



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/3/3/V.03/HK/2024

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI TAHUN 2023-2043

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, yang menyebutkan penetapan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tata Transportasi Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI TAHUN 2023-2043.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023-2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Narasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi, serta Peta dan Daftar Ruas Jalan.
- KETIGA : Peta dan Daftar Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi jalan provinsi, jalan yang belum terhubung, belum terbangun.
- KEEMPAT : Ruas jalan yang tercantum dalam Daftar Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023-2043 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 3/313/V.03/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

NASKAH RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI TAHUN 2023 - 2043

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No 38 Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Untuk mempermudah segala jenis aktivitas yang terjadi maka dibutuhkan kondisi dan kualitas jalan yang memadai.

Menurut UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan provinsi meliputi:

- a) Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2 (JKP-2).
- b) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3 (JKP- 3).

- c) Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua pusat kegiatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/434/V.03/HK/2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, terdiri dari 98 ruas jalan dengan total panjang 1.695,479 km yang menghubungkan antar 15 Kabupaten/Kota.

1.2. KORELASI TRANSPORTASI DALAM PDRB PROVINSI LAMPUNG

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Perkembangan sektor transportasi akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara satu daerah dengan daerah lain. Distribusi barang dan manusia akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi

yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia.

Selama Tahun 2016-2021, Moda transportasi utama perdagangan antar wilayah di Provinsi Lampung adalah angkutan jalan. Hal ini dapat dilihat dari peranan angkutan jalan (darat) yang memiliki peranan distribusi nilai ekonomis yang paling tinggi jika di dibandingkan dengan angkutan lainnya.

1.3. ISU STRATEGIS BIDANG KEBINAMARGAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/434/V.03/HK/2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, terdiri dari 98 ruas jalan dengan total panjang 1.695,479 km yang menghubungkan antar 15 Kabupaten/Kota. Berdasarkan dokumen P-Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Lampung, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Lampung secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Lampung melalui berbagai pertimbangan, yang diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya konektivitas wilayah Barat - Timur dan Utara - Selatan sehingga menyebabkan disparitas perkembangan wilayah di Provinsi Lampung;
- b. Perlunya peningkatan konektivitas pusat - pusat produksi menuju Jalan Tol Trans Sumatera (*backbone*);
- c. Percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri Provinsi Lampung membutuhkan dukungan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan;

- d. Pemeliharaan rutin dengan sistem Unit Reaksi Cepat (URC);
- e. Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum memadai;
- f. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan;
- g. Biaya logistik yang tinggi akibat buruknya pelayanan transportasi;
- h. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang Kebinamargaan;
- i. Dukungan pembangunan infrastruktur jalan non status yang mendukung program prioritas Provinsi.

1.4. KEBUTUHAN PERENCANAAN

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi yang selanjutnya disingkat RUJPJP adalah dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi memuat dan menggunakan asumsi-asumsi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), faktor ekonomi, pertumbuhan lalu lintas, hirarki jaringan jalan, implementasi pembangunan, pembiayaan pembangunan, penganggaran, dan standar teknis jalan.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi disusun berdasarkan:

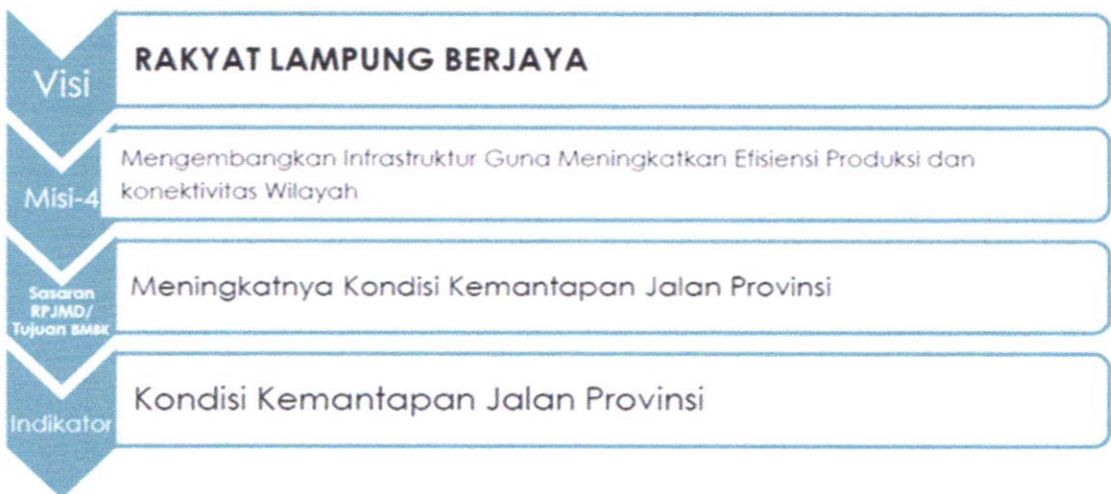
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Tataran Transportasi Wilayah Provinsi yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi; dan
4. RUJPJJN (Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional)

Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antar moda, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antara pusat dan daerah.

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Menurut Renstra Perubahan Tahun 2019 - 2024, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.



Sumber : Renstra Perubahan BMBK Tahun 2019 – 2024

Gambar 2.1. Visi Misi

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung adalah pada misi ke empat yaitu “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”. Tujuannya adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah.

Tabel 2.1. Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung

Visi	Misi
1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan	1. Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai. 2. Mewujudkan “Good Governance”

Visi	Misi
ten tram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja. 2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisimasyarakat yang cerdas (<i>smart</i>) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, sertatidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan. 3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global. 4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 5. Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025.	Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik. 3. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel. 4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah. 5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan. 6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Sumber: Renstra Perubahan BMBK Tahun 2019 - 2024

Misi Gubernur Lampung yang keempat yaitu Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah, sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan misi tersebut

di atas, maka Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok program prioritas yang berkaitan dengan tugas Dinas BMBK Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional.

Dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025 - 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Membangun Lampung 2045 juga berkontribusi untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tabel 2.2. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025 – 2045

Visi	Misi
Tangguh, Maju, Beradab, dan Berkelanjutan	1. Transformasi Sosial (Sumber Daya Manusia Unggul, Adaptif Dan Produktif) 2. Transformasi Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Pendapatan Penduduk Yang Tinggi) 3. Transformasi Tata Kelola (Pelayanan Publik Transparan Dan Berkualitas, Kemiskinan Dan Ketimpangan Yang Rendah) 4. Keluarga Berkualitas, Pemuda Tangguh, Masyarakat Religius, Rukun Dan Berbudaya 5. Kehidupan Demokratis Dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum 6. Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah 7. Sarana Prasarana Berkualitas Dan Lingkungan Berkelanjutan 8. Kestinambungan Pembangunan (Kepemimpinan Kuat Dan Pendanaan Pembangunan Mandiri)

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung 2025 - 2045

Berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025 - 2045, dalam penyusunan Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung ini berkaitan dengan Misi ke 6 & 7 yaitu “Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Sarana Prasarana Berkualitas Dan Lingkungan Berkelanjutan”.

Dari hasil tinjauan kebijakan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025 - 2045 diketahui visi, misi dan tujuan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung yang berpedoman dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung, dijabarkan visi, misi dan tujuan Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Visi yaitu “Tangguh, Maju, Beradab dan Berkelanjutan”

2.2. MISI

Misi yaitu:

1. Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah
2. Sarana Prasarana Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

2.3. TUJUAN

Tujuannya adalah Pengembangan Jaringan Jalan yang Mantap dan Terkoneksi untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.

2.4. ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2045

Dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045, Pilar Pembangunan 2045 difokuskan untuk memperluas cakupan pemerataan pembangunan yang tercermin pada semakin meratanya infrastruktur dan pendapatan seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antar wilayah yang semakin kecil, serta pengentasan kemiskinan. Dalam mewujudkan hal tersebut, arah Pembangunan Infrastruktur 2045 dituangkan dalam Visi Indonesia 2045 yaitu meningkatkan konektivitas fisik dan virtual; mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah; memenuhi prasarana dasar; mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan antisipasi bencana alam dan perubahan iklim.

Peran penting infrastruktur konektivitas untuk pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi wilayah dengan mendorong wilayah Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI);
3. Mengembangkan setiap wilayah secara searah, dan sesuai dengan keunggulan dan karakteristiknya yang merupakan penentu bagi penetapan sasaran pembangunan infrastruktur konektivitas; dan

4. Memenuhi prasarana dasar melalui pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

BAB 3 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi (RUPJJP) Lampung mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2019 - 2024. Dengan penjabaran arah kebijakan pembangunan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi (BMBK) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penataan pola penanganan jalan dengan sistem koridor.
- b. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan dengan memprioritaskan penanganan pada ruas-ruas yang berdampak pada mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai konektivitas antar wilayah.
- c. Memberi dukungan pelebaran akses masuk dan keluar gerbang tol yang melintasi ruas jalan provinsi. Pemerataan dan pengembangan infrastruktur guna meningkatkan sarana dan prasarana berkualitas

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penataan Pola Penanganan Jalan Dengan Sistem Koridor	Peningkatan Struktur Jalan Dan Jembatan
2	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala jalan dengan memprioritaskan penanganan pada ruas - ruas yang berdampak pada mengembangkan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Kawasan - Kawasan Wisata Unggulan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai konektivitas antar wilayah. serta memberi dukungan pelebaran akses masuk dan keluar gerbang tol yang melintasi ruas provinsi.	Pemeliharaan (rehabilitasi) Berkala Jalan dan Jembatan
3	Pengembangan UPTD untuk memperpendek rentang kendali dan efektivitas kinerja	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

No	Arah Kebijakan	Strategi
	pemeliharaan rutin jalan. Melalui Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1	melalui UPTD Wilayah
4	Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dengan berbagai pelatihan, diskusi, seminar dan sosialisasi tentang norma, standar pedoman, manual serta perkembangan teknologi yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas
5	Melakukan penanganan jalan dan jembatan yang dianggap non status (selain jalan status provinsi) pada wilayah - wilayah yang memerlukan akses secara langsung untuk membuka konektivitas daerah	
6	Pemerataan dan pengembangan infrastruktur jalan dengan memprioritaskan penanganan pada ruas - ruas strategis guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai konektivitas antar wilayah	

Sumber: Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 dan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025 - 2045

Untuk melaksanakan Misi ke-4 ini, salah satu komitmen yang berkaitan langsung dengan Arah dan Kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2019 - 2024 adalah perlunya perluasan dan pengintegrasian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata. Hal ini tentu telah sesuai dengan rencana penanganan ke 14 ruas yang merupakan prioritas untuk segera ditangani, dimana pada ruas-ruas prioritas tersebut terdapat nilai-nilai strategis ruas jalan berupa aspek potensi ekonomi wilayah, aspek aksesibilitas kewilayahan dan aspek penataan pola penanganan jalan dengan sistem koridor yang apabila

terintegrasi dapat mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah.

Untuk mencapai misi ke-4, pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tergambar pada Agenda Kerja Utama (AKU) yang ke 17,18, dan 27 yaitu :

- 17: Infrastruktur Lampung Berjaya, membangun infrastruktur untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
- 18: Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur, menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat.
- 27: Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata Indonesia, mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan pariwisata.

Dalam pelaksanaan tiga Agenda Kinerja Utama (AKU) diatas, maka dalam pengembangan infrastruktur jalan yang sistematis dan terarah perlu disusun suatu dokumen perencanaan sebagai dasar pedoman atau acuan bagi pihak pengambil kebijakan dalam perumusan rencana program pembangunan. Namun, anggaran infrastruktur yang terbatas, kebutuhan pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas struktur jalan adalah hal pokok yang amat penting dalam konteks pembangunan daerah. Investasi pembangunan jalan tetap saja lebih murah untuk dilakukan saat ini karena nilai uang yang cenderung menurun sedangkan harga bahan dan satuan pekerjaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

BAB 4

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI

Pada dasarnya, perkembangan jaringan jalan akan terus terjadi seiring perkembangan kehidupan dan peradaban sehingga pengembangan jaringan jalan provinsi dengan fungsi Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Namun, perkembangan jaringan jalan tersebut baru akan tercapai dengan baik dan berdampak positif apabila perkembangannya dapat diprediksi dan/atau direncanakan. Salah satu langkah dalam memprediksi dan/atau merencanakan pengembangan jaringan jalan yaitu dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan sebagai pemicu perkembangan jaringan jalan, baik sebagai pemicu perkembangan JAP maupun JKP- 1, yaitu *traffic demand*, perkembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Bandar Udara, Pelabuhan, Terminal, Kebijakan Pemerintah seperti RPJMN, Perpres/Inpres Perbatasan, Akses PLBN, dan lain-lain.

Tahap analisis pengembangan JAP dan JKP-1 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang berupa Tatranas (Tatanan Transportasi Nasional), dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Sedangkan, analisis kebutuhan jaringan jalan dilakukan dengan mencermati perubahan penggunaan jalan serta rencana kebutuhan JAP dan JKP-1. Untuk menyusun perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan, identifikasi juga dilakukan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan periode tahun pembangunan jalan, sehingga setiap periode tahun perencanaan

jalan dapat diketahui rencana panjang jalan yang akan dibangun pada masing-masing periode pembangunan.

Asumsi yang diterapkan dalam pengembangan jaringan jalan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata.
2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional.

BAB 5 INDIKASI PROGRAM (UTAMA) 5 TAHUNAN

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengembangkan program dan kegiatannya sesuai dengan kondisi riil yang ditemukan di setiap tahunnya. Karena harus diakui, kondisi jaringan jalan dan faktor yang melingkupinya selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan program dan kegiatan yang dapat diadaptasi dengan baik oleh pemerintah kota. Karena itu, apa yang digambarkan didalam program dan kegiatan di dokumen ini merupakan arahan secara umum (*guide line macro*) yang diharapkan dapat menuntun kebijakan pemerintah ke arah yang lebih tepat / relevan.

Indikasi program 5 (lima) tahunan merupakan petunjuk yang memuat usulan program dan perkiraan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan jaringan jalan. Indikasi Program merupakan acuan utama dalam penanganan ruas-ruas yang menjadi kunci untuk mencapai tujuan pengembangan jaringan jalan Provinsi Lampung. Indikasi Program Utama lima tahunan disusun untuk rencana dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam periode 2023-2028, 2039-2033, 2034-2038, dan 2039-2043.

Jaringan jalan Provinsi Lampung, yang dikelompokkan atas atas Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), dan Jalan Strategis Provinsi (JSP), menjadi pendukung utama atas pergerakan orang, barang, dan jasa yang membentuk jaringan dengan jalan nasional maupun jalan kabupaten. Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya (kapasitas dan struktur) merujuk pada kepentingan ruas jalan dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat kegiatan masyarakat. Kebutuhan penanganan jaringan jalan dihadapkan pada keterbatasan anggaran menjadi isu pokok untuk

merealisasikan program penanganan jaringan jalan sesuai dengan target kemantapan yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah melalui stimulus dana pembangunan infrastruktur strategis serta inisiasi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pembiayaan penanganan jalan.

Tabel Indikasi 5.1. Program Kegiatan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

No	Kegiatan	Periode Rencana																										
		Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)						Prioritas IV (2039-2043)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
1	Kota Bandar Lampung																											
A. Pemeliharaan Berkala																												
Pengem banan jaringan jalan yang muntap dan terkone ktivitas untuk mencap ai keselimb aungan pemban gunaan	1 2	1 1	JALAN MAYJEN. H.M. RYACUDU (BANDAR LAMPUNG)																									
			JALAN TENGOIR I (BANDAR LAMPUNG)																									
			JALAN RE. MARTADI NATA (BANDAR																									

No	Kegiatan	Periode Rencana															
		Prioritas I (2023-2028)				Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)			
		Nomor Program Ruas	Nama Ruas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			LAMPUNG)														
Kota Metro																	
A. Pemeliharaan Berkala																	
		7 1	JALAN AHMAD YANI (METRO)														
		1 7	JALAN VETERAN (METRO)														
		1 7	JALAN PATIMURA (METRO)														
B. Pemeliharaan Rutin																	

No	Program	Kegiatan	Periode Rencana																					
			Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		151	JALAN BUDI UTOMO (METRO)																					
		152	JALAN SOEKARNO HATTA (METRO)																					
		218	JALAN BRIGJEN. KATAMSO (METRO)																					
		Lampung Barat																						
		A. Pemeliharaan Berkala																						
		511	JALAN RADEN INTAN (LIWA)																					
		B. Pemeliharaan Rutin																						

N o	Kegiatan	Periode Rencana																							
		Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)					Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)					Prioritas IV (2039-2043)					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		48		PEKON BALAK - SUOH																					
		49		SUCH - SP. BLOK 9																					
		52		LIWA BTS SUMATE RA SELATAN																					
		59		SP. TRIMULY O - BUNGIN - SP. TUGU SARI																					
Lampung Selatan																									
A. Pemeliharaan Berkala																									

No	Program	Kegiatan		Periode Rencana																													
		Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)								Prioritas IV (2039-2043)								
				202	202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204	204		
				3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
			JALAN ZAINAL ABIDIN PAGARALAM (KALAND A)																														
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																													
		1	1	K																											</		

B. Pemeliharaan Rutin

No	Program	Kegiatan		Periode Rencana																															
		Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)								Prioritas III (2034-2038)								Prioritas IV (2039-2043)							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050				
			SUKADA MAI																																
			SP. KORPRI - PURWOT ANI																																
		16																																	
Lampung Tengah																																			
A. Pemeliharaan Berkala																																			
		26	BANGUNR EJO - WATES																																
B. Pemeliharaan Rutin																																			
		18	METRO - KOTA GAJAH																																
		19	KOTA GAJAH - SP. RANDU																																

N o	Kegiatan	Periode Rencana															
		Prioritas I (2023-2028)				Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)			
		Program in	Nomor Ruas	Nama Ruas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		20		SP RANDU - SEPUTIH SURABAY A													
				SEPUTIH SURABAY A SADEWA													
			21	BANDAR JAYA - SP. MANDAL A													
			22	GUNUNG SUGIH KOTA GAJAH													
			23	KALIREJ O - BANGUNR EJO													

No	Kegiatan	Periode Rencana																																		
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)								Prioritas III (2034-2038)								Prioritas IV (2039-2043)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043											
	27			WATES - METRO																																
	29			GUNUNG SUGIH - PADANG RATU																																
	30			PADANG RATU. PEKURUM UDIK																																
	32			PADANG RATU - KALIREJO																																
	Lampung Timur																																			
A. Pemeliharaan Berkala																																				
	9			NYAMPIR TANJUNG KARI																																

No	Kegiatan	Periode Rencana																										
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)								Prioritas IV (2039-2043)		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
		14	SUKADA MAI - KIBANG																									
B. Pemeliharaan Rutin																												
		5	BELIMBING SARI - JABUNG																									
		6	JABUNG - SP. LABUHAN MARINGAI																									
		8	METRO TANJUNG KARI																									
		10	TANJUNG KARI PUGUNG RAHARJO																									

Kegiatan			Periode Rencana																					
Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)					Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)					Prioritas IV (2039-2043)						
			202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204	204	
			3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	
	1	PUGUNG RAHARJO JABUNG																						
	1																							
	2	KOTA GAJAH GEDONG DALEM																						
	4																							
Lampung Utara																								
B. Pemeliharaan Rutin																								
	3	PEKURUN UDIK - AJI KAGUNG AN																						
	1																							
	6	TAMAN SISWA - RAJA ASLI																						
1																								

N	Kegiatan			Periode Rencana																							
	Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)								Prioritas III (2034-2038)							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	6	2	KOTABU MI - BANDAR ABUNG																								
			BANDAR ABUNG - BANDAR SAKTI																								
			BANDAR ABUNG - SP. TUJOK																								
			NEGARA RATU - SP. TUJOK																								
			KOTABU MI - KETAPAN G																								
	7	1	KETAPAN G -																								

Kegiatan			Periode Rencana																									
Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)						Prioritas III (2034-2038)						Prioritas IV (2039-2043)					
			202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204	204	204		
			3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3					
		NEGARA RATU																										
	7	NEGARA RATU - GUNUNG BETUAH																										
	8	NEGARA RATU - SP. SOPONYO NO																										
	1																											
Measji																												
A. Pemeliharaan Berkala																												
		SP. PEMATAN G - BRABASA N																										
	9																											
	4																											
B. Pemeliharaan Rutin																												

N o	Kegiatan	Periode Rencana															
		Prioritas I (2023-2028)				Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)			
		Nomor Ruang	Nama Ruang	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		95	BRABASA N - WIRALAG A														
		Pasarwatu															
		A. Pemeliharaan Berkala															
		40	PADANG CERMIN - KEDOND ONG														
		B. Pemeliharaan Rutin															
		37	BRANTI - GEDONG TATAAN														
		38	GEDONG TATAAN - KEDOND ONG														

Kegiatan			Periode Rencana																				
Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)					Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)					Prioritas IV (2039-2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	39	KEDONDONG - PARDASUKA																					
	42	LEMPASING PADANG CERMIN																					
	43	PADANG CERMIN - SP TELUK KILUAN																					
	Pesisir Barat																						
A. Pemeliharaan Berkala																							
53	11	JALAN ADAM MALIK (KRUI)																					

N o	Kegiatan	Periode Rencana															
		Program				Prioritas I (2023-2028)				Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)			
		Nomor	Nama	Ruas	Ruas	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	5		KRUI - PEKON SERAI														
	4		KOTAJA WA - KAMPUNG BARU														
	5																
	5																
	5																
Pringsewu																	
B. Pemeliharaan Rutin																	
	3		KALIREJ O - PRINGSE WU														
	3																
	3		PRINGSE WU - PARDASU KA														
	4																
	3		PARDASU KA - SUKAMARA														
	3																
	5																

No	Kegiatan	Periode Rencana																							
		Progr am	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)				
					202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204	204
					3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
Tenggulus																									
A. Pemeliharaan Berkala																									
6				TEKAD BATUTEG I																					
0																									
B. Pemeliharaan Rutin																									
3				SUKAMA RA - KURIPAN																					
6																									
4				SP TELUK KILUAN - SP UMBAR																					
4																									
4				SP - UMBAR - PUTIH DOH																					
5																									

No	Kegiatan	Periode Rencana																					
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)				Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Tulang Bawang																							
A. Pemeliharaan Berkala																							
85	11	K	JALAN RAYA GUNUNG SAKTI (MENGGAL)																				
B. Pemeliharaan Rutin																							
86			BUJUNG TENURK PENUNGA NGAN																				
92			SP. UNIT VIII - GEDONG AJI																				
93			GEDONG AJI- UMBUL																				

No	Kegiatan	Periode Rencana																							
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
				MESIR																					
Tulang Bawang Barat																									
B. Pemeliharaan Rutin																									
64			BANDAR SAKTI - SP. DAYA MURNI																						
65			SP. DAYA MURNI GUNUNG BATIN																						
68			SP. TUJOK - PANARAGAN JAYA																						
69			PANARAGAN JAYA - SP. PANARAG																						

No	Program	Kegiatan		Periode Rencana																				
		Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
			AN																					
		87	PENUMA NGAN TEGAL MUKTI																					
		90	ADJAJA - TULUNG RANDU																					
		91	PENUMA NGAN- UNIT VI																					
		Way Kanan																						
B. Pemeliharaan Rutin																								
	73		GUNUNG BETUAH - GUNUNG LABUAN																					

No	Kegiatan	Periode Rencana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)													Prioritas II (2029-2033)					Prioritas III (2034-2038)					Prioritas IV (2039-2043)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			7	4	SP EMPAT - KASUI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No	Kegiatan	Periode Rencana																						
		Program	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)			
					202	202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204
	79			PAKUAN RATU - BUMIHAR JO																				
	80			BUMIHAR JO - SP. WAY TUBA																				
	82			SP SOPONTO NO - SERUPA INDAH																				
	83			SERUPA INDAH PAKUAN RATU																				
	84			SERUPA INDAH - TAJAB																				
88			TEGAL MUKTI -																					

N o	Kegiatan	Periode Rencana																							
		Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)				Prioritas III (2034-2038)				Prioritas IV (2039-2043)				
					202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	202 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0	204 1	204 2	204 3

N o	Kegiatan	Periode Rencana																																		
		Progra m	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prioritas I (2023-2028)								Prioritas II (2029-2033)								Prioritas III (2034-2038)								Prioritas IV (2039-2043)							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047							
	jalan strategi Provinsi		Rencana Jalan Lingkar Utara Bander Lampung																																	
			Rencana Jalan Lingkar Utara Pringsewu																																	
			Rencana Jalan Lingkar Selatan Pringsewu																																	
			Rencana Jalan Lingkar Utara dan Selatan Metro																																	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 6 MANFAAT EKONOMI DAN LAINNYA

6.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Peningkatan pembangunan jalan dengan sistem lintas dan penghubung lintas akan membentuk jaringan yang menjadi tulang punggung sistem jalan Provinsi Lampung. Sistem jaringan jalan provinsi akan membentuk satu kesatuan jaringan yang efisien dan efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas seluruh wilayah. Dengan pengembangan kapasitas secara bertahap, jaringan jalan diharapkan mampu memberikan peningkatan kecepatan dan mobilitas angkutan barang dan orang, baik pada koridor ekonomi maupun pada akses-akses strategis serta menguatkan konektivitas ke seluruh wilayah.

Tersedianya jaringan jalan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, yaitu menghubungkan produsen, pasar, dan konsumen. Selain itu, tersedianya jaringan jalan akan membuka akses dan memberi peluang masyarakat lokal untuk masuk, dan menembus dunia usaha sehingga mendorong terbentuknya lapangan kerja baru. Pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya jalan, dapat menjangkau wilayah atau daerah terpencil (desa) yang potensial secara ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memperbaiki pemerataan pendapatan antar wilayah.

Perdagangan dan logistik di Provinsi Lampung tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan yang efisien antara pelabuhan laut dan bandar udara dengan pasar internasional, melainkan juga dipengaruhi oleh keterhubungan yang baik di bagian darat sebagai hasil dari konektivitas jaringan jalan atau jaringan transportasi lainnya ke lokasi sumber daya alam, pertanian, maupun pusat-pusat industri.

Keterhubungan jaringan transportasi darat antara pelabuhan sebagai pintu keluar menuju kawasan penyangganya diperkirakan memberikan kontribusi lebih dari setengah biaya logistik atas barang barang untuk pasar internasional.

Realisasi dari potensi pertumbuhan ekonomi akan menempatkan Provinsi Lampung ke posisi yang lebih kuat dalam kancah persaingan nasional. Dalam tinjauan domestik, jutaan rupiah bisa dihemat sehingga berpotensi meningkatkan akses kepada pendidikan, lapangan kerja dan kesehatan. Hal ini dapat dicapai apabila upaya dan langkah nyata menuju perubahan telah dilakukan.

Selain pengaruh tersebut, perwujudan Infrastruktur jalan akan memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Pembangunan jalan memiliki multiplier effect yang besar terhadap pembangunan nasional. Proses pembangunan jalan melibatkan banyak sektor, mulai dari sektor yang berkaitan langsung terhadap pembangunan jalan seperti perencana, kontraktor, dan sebagainya; industri aspal dan furniture jalan, dan sebagainya; hingga sektor yang tidak terkait secara fisik di lapangan, tetapi mendapatkan manfaat dari kegiatan pelaksanaan program infrastruktur jalan, seperti industri makanan, akomodasi, pusat pelatihan, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam rencana tersebut.

6.2. MENINGKATKAN DAYA SAING

Kelangkaan ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastruktur mempengaruhi tingkat daya saing Provinsi Lampung di kancah nasional. Pertumbuhan kebutuhan perjalanan yang tinggi, dan rendahnya perkembangan jaringan jalan bebas hambatan

menimbulkan kemacetan di jaringan jalan nasional yang mengakibatkan tingkat keterlayanan sektor logistik menjadi rendah. Hambatan ekonomi akibat kemacetan lalu lintas terjadi di berbagai wilayah perkotaan, dan tidak hanya di kota metropolitan Jakarta. Di beberapa kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain yang memiliki bandar udara, pelabuhan, dan daerah industri penting, fenomena kemacetan lalu lintas juga dapat dirasakan. Hal tersebut menyebabkan rata-rata waktu tempuh di koridor utama yang merupakan faktor kunci dalam penentuan biaya transport dan daya saing logistik menjadi lebih lama dari negara-negara tetangga.

Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan adalah prasyarat penting untuk meningkatkan kelancaran mobilitas barang dan orang serta berpengaruh kepada tingkat aksesibilitas wilayah. Penguatan pembangunan, dan pengembangan jaringan infrastruktur transportasi akan meningkatkan daya saing perekonomian, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, serta meningkatkan kesempatan untuk melakukan penataan kelembagaan ekonomi yang berfungsi untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

6.3. PENYEDIAAN KEBUTUHAN TRANSPORTASI DI DAERAH BERKEMBANG

Terkait konektivitas, dan mobilitas, jaringan jalan yang tidak efisien akan menimbulkan hambatan bahkan kegagalan dalam melakukan pergerakan. Hal tersebut bisa mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga memicu rendahnya kualitas hidup. Kemacetan lalu lintas merupakan indikasi kunci bahwa prasarana jalan perlu diusahakan agar mampu melayani kebutuhan perjalanan secara lebih

baik. Terdapat 2 (dua) tantangan dalam penyusunan rencana induk (masterplan), yaitu terjadinya penurunan efisiensi, dan peningkatan kebutuhan untuk melakukan perjalanan akibat tingginya pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan daya saing, program peningkatan kapasitas jaringan jalan nasional, dan perbaikan konektivitas jaringan transportasi jalan akan memperkuat keterhubungan, dan akses antara daerah produksi dengan pasar dan komunitas secara antarmoda.

Sebaliknya, keterbatasan jaringan jalan akan menekan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Untuk itu, jalan bebas hambatan sebagai tulang punggung jaringan jalan nasional sangat diperlukan untuk mendukung konektivitas pusat-pusat perekonomian domestik dengan pasar luar negeri. Tentu saja, hal tersebut didukung oleh program akselerasi perbaikan kualitas pelayanan perjalanan regional untuk memberikan tingkat kecepatan dan keselamatan yang baik.

Kegiatan pembangunan jalan pada hakikatnya adalah sebuah aksi untuk melakukan perubahan ekosistem dan lingkungan hidup demi meningkatkan penghidupan, dan mempermudah masyarakat pedesaan dalam menjalani kehidupannya agar tidak cenderung bergantung pada satu tradisi pergerakan saja. Untuk itu, partisipasi masyarakat pedesaan sangat diperlukan sebagai dukungan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Setiap program pembangunan jalan desa dimaksudkan untuk membantu dan memacu kemampuan masyarakat setempat sehingga proses pembangunan berbagai sarana dan prasarana lain yang mereka butuhkan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Pembangunan jalan diharapkan memberi peluang perbaikan di berbagai aspek kehidupan, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan; mengembangkan, dan menggerakkan ekonomi rakyat di suatu kawasan, dan sekitarnya; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat; membuka akses bagi masyarakat daerah terpencil untuk berusaha; menciptakan lapangan kerja; memperlancar arus barang dan jasa; serta menjamin ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok lainnya.

Pembangunan prasarana jalan di desa adalah implementasi keinginan masyarakat untuk terus berkembang secara sosial dan ekonomi. Seluruh aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien, dan bermanfaat setelah dibangunnya prasarana jalan sebagai media penghubung antar dusun, selain membuka akses yang lebih baik dengan daerah-daerah lainnya.

6.4. KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERTAHANAN KEAMANAN

Jaringan jalan yang baik akan menjadi faktor pendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Jaringan jalan tersebut dibangun melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah. Sehingga, jaringan jalan yang baik memiliki peran krusial untuk membentuk dan memperkuat kesatuan nasional; memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Koridor Poros Pengembangan Strategis (Koridor Pantai Timur Sumatera; Koridor Pantura Jawa-Bali; Koridor Pantai Barat, dan Pantai

Timur Kalimantan) secara garis besar mempengaruhi aspek geografis, geopolitik dan geoekonomi. Aspek-aspek tersebut berada dalam Kerangka Pengembangan Strategis yang berlandaskan aspek Pengembangan Ekonomi, Keseimbangan Antarwilayah (daerah tertinggal dan daerah berkembang), dan Aspek Kesatuan Teritorial NKRI dalam konteks Kerangka Strategis Berorientasi Ekonomi (Investasi).

Dalam konteks orientasi keseimbangan antarwilayah, kawasan-kawasan koridor yang berada di daerah tertinggal seperti Kawasan Koridor Pantai Barat Sumatera, Pansela Jawa, dan Koridor Kalimantan Tengah merupakan poros pengembangan strategis ekonomi sebagai penggerak mula (prime-mover) terdahulu. Pengembangan jalan perbatasan dan lintas batas antarnegara berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di perbatasan antarnegara, seperti di wilayah perbatasan Malaysia di Kalimantan bagian utara, perbatasan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, serta perbatasan Papua Nugini di Papua. Secara keseluruhan, pengembangan tersebut mendorong pemantapan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6.5. PELAYANAN MASYARAKAT DAN GENDER

Pembangunan jaringan jalan mendorong pengembangan sistem pelayanan secara antar moda dan intra moda. Untuk penggunaannya, diperlukan juga serangkaian rencana aksi untuk mendorong penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat

berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan yang berwawasan lingkungan, berkeselamatan, serta memenuhi standar disabilitas dan gender sehingga meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

Keselarasan antara jaringan jalan, dan infrastruktur perundang-undangan diharapkan akan memberikan peningkatan mutu pelayanan angkutan umum massal dengan didukung sarana pelayanan pengumpan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau, dan ramah lingkungan. Seluruhnya bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan, dan memberi sumbangan kepada peningkatan budaya tertib dan disiplin berlalu lintas melalui terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan yang berkeselamatan dan berstandar gender. Secara terkendali dengan didukung sistem tata ruang yang baik, berwawasan lingkungan, memenuhi standar gender, dan berkeselamatan-pembangunan jaringan jalan perkotaan yang diikuti sistem transportasi massal akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan secara berkesinambungan.

6.6. DINAMIKA NILAI TANAH

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan prasarana untuk kepentingan umum masih dianggap kontroversial, dan cenderung lebih menguntungkan pihak penguasa dan pemilik modal besar dibanding berpihak kepada masyarakat kecil. Banyaknya berbagai proyek properti dalam skala besar tetapi sangat kering dalam pembangunan infrastruktur kota seperti jalan memberi dampak pada semakin

padatnya wilayah perkotaan. Hal tersebut dapat diamati pada meningkatnya fenomena kemacetan lalu lintas, terjadinya genangan air saat terjadi hujan, hingga permasalahan banjir yang masih perlu dipecahkan.

Kurangnya infrastruktur turut menambah beban biaya hidup masyarakat akibat berbagai kerusakan dan tidak berfungsinya sistem pelayanan infrastruktur untuk kehidupan yang layak. Belajar dari pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur sebelumnya, berbagai kegagalan dan/atau penundaan pengerjaan proyek seperti pembangunan banjir kanal, penataan bantaran sungai, pembangunan rumah susun, serta berbagai kasus “pembebasan tanah” jalan tol memberikan informasi bahwa persoalan lahan atau tanah adalah “wilayah sensitif” yang dapat membawa dampak negatif kontroversial terkait berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Sebagai dampak pesatnya pertambahan penduduk, peningkatan nilai lahan yang terus menjadi semakin mahal turut mendorong terjadinya penyimpangan (deviasi) pada tata ruang kota. Antara lain, perubahan tata guna lahan, pengalihan (konversi) fungsi jalan, peningkatan pemakaian lahan ilegal, dan penurunan jumlah dan luas ruang terbuka hijau (RTH). Penyimpangan tata ruang ini dapat terjadi baik secara legal difasilitasi oleh pemerintah, maupun ilegal dilakukan masyarakat dan swasta.

Implementasi rencana pembangunan infrastruktur kota masih menyimpan banyak kendala. Salah satu masalah utama yang harus segera dipecahkan adalah belum sinergisnya pelaksanaan strategi pembangunan perkotaan. Rencana tata ruang kota yang seharusnya dijadikan acuan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan belum dijadikan bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota

cenderung belum banyak melibatkan masyarakat atau, kurang aspiratif sehingga kota kehilangan visi pengembangannya. Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan, dan kepentingan berbagai instansi yang masih tumpang tindih.

Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan infrastruktur kota menjadi sangat penting. Titik berat penuntasan permasalahan pembangunan infrastruktur kota adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memudahkan proses pemecahan berbagai persoalan sosial ekonomi, termasuk hal-hal terkait permasalahan hak asasi manusia sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat benar - benar bermanfaat, dan tidak menambah beban baru sebagai akibat dari peminggiran aspirasi nyata masyarakat. Diharapkan dengan pembangunan jaringan jalan perkotaan yang diikuti pengembangan sistem transportasi massal dalam sebuah rencana tata ruang yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

6.7. MANAJEMEN PELAYANAN PENGGUNA JALAN

Peningkatan pelayanan untuk masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pengguna jalan dan pemerintah. Keterkaitan itu dimungkinkan melalui Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam jangka dua puluh tahun ke depan, struktur dan pengorganisasian berikut SOP (*standar operational procedures*) penggunaan infrastruktur jalan yang disusun harus mampu untuk menimbulkan interaksi yang cukup erat di antara pemangku kepentingan. Rencana peningkatan pelayanan untuk masyarakat harus dilakukan dengan mengajukan bukti - bukti yang cukup. Antara lain, data-daca dan informasi yang didapat melalui proses analisis perbandingan hasil evaluasi tahun terdahulu dengan tahun yang berlaku. Ataupun, mengacu kepada penilaian yang dilakukan oleh

organisasi internasional seperti Studi World Bank ,ADB, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan proses Operation and maintenance jalan diperlukan manajer yang berkantor permanen di sekitar lokasi sehingga dapat melakukan inspeksi secara teratur , dan memberikan respon cepat atas kejadian kerusakan jalan, selain menjadi tempat untuk masyarakat menyalurkan keluhan. Di sekitar lokasi, sistem manajer ruas dan sub manajer ruas perlu dibentuk, dan berkedudukan di sana. Kerja sub manajer ruas akan didukung oleh penilik jalan untuk melakukan pemantauan kondisi jakm dan unit pemeliharaan rutin.

Pengguna jalan menginginkan jalan nasional yang aman, nyaman, berkualitas, berkeselamatan, ramah gender, dan terpelihara. Pada umumnya, jalan nasional yang dibangun sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan, tetapi masih terdapat beberapa lokasi rawan kecelakaan sebagai akibat sub-standar, perubahan tata ruang, dan degradasi lingkungan. Pengurangan lokasi rawan kecelakaan merupakan isu utama.

Peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan jalan dirasakan semakin menguat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pemanfaatan. Cukup banyak masukan dari masyarakat berupa kritik, saran, maupun usulan yang diterima. Namun, masih terdapat kendala yang muncul sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang kurang terpuji. Hal tersebut juga memberi dampak besar dalam kelangsungan penyelenggaraan jalan. Misalnya, kurangnya sikap tertib dalam penggunaan jalan, termasuk melakukan pemanfaatan ruang di jalan; selain, terhambatnya proses pembebasan lahan untuk jalan akibat ulah beberapa orang. Ketertiban penggunaan

dan ketepatan pemanfaatan jalan serta lancarnya proses penyelenggaraan jalan akan sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi kehidupan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

111

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TANGGAL :

**PETA DAN DAFTAR RUAS
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI
TAHUN**



KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN

DAFTAR RUAS JALAN PROVINSI LAMPUNG

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
1	1 11 K	JALAN ZAINAL ABIDIN PAGARALAM (KALLIANDA)	2,890
2	2	KALLIANDA - KUNYIR - GAYAM	30,250
3	3	GAYAM KETAPANG	11,297
4	4	SP . SIDOMULYO BELIMBING SARI	25,012
5	5	BELIMBING SARI - JABUNG	9,308
6	6	JABUNG - SP . LABUHAN MARINGAI	22,962
7	7 11 K	JALAN AHMAD YANI (METRO)	2,770
8	8	METRO TANJUNG KARI	24,251
9	9	NYAMPIR TANJUNG KARI	7,876
10	10	TANJUNG KARI PUGUNGRAHARJO	24,491
11	11	PUGUNGRAHARJO JABUNG	26,558
12	12 11 K	JALAN MAYJEN . HM . RYACUDU (BANDAR LAMPUNG)	3,315
13	13	SP . KORPRISUKADAMAI	20,468
14	14	SUKADAMAI - KIBANG	4,419
15	15 11 K	JALAN BUDIUTOMO (METRO)	4,568
16	16 15 12 K	JALAN SOEKARNOHATTA (METRO)	2,297
17	17 16	SP . KORPRI - PURWOTANI	14,551
18	18 17 11 K	JALAN VETERAN (METRO)	1,505
19	19 17 12 K	JALAN PATTIMURA (METRO)	3,517
20	20 18	METRO - KOTA GAJAH	14,222
21	21 19	KOTA GAJAH - SP . RANDU	29,450
22	22 20	SP RANDU - SEPUTH SURABAYA	24,700
23	23 21	SEPUTH SURABAYA SADEWA	24,230
24	24 22	BANDAR JAYA - SP . MANDALA	37,016
25	25 23	GUNUNG SUGIH KOTA GAJAH	13,984
26	26 24	KOTA GAJAH GEDONG DALEM	15,065
27	27 25	KALIREJO - BANGUNREJO	14,086
28	28 26	BANGUNREJO - WATES	22,212
29	29 27	WATES - METRO	12,415
30	30 28 11 K	JALAN BRIGJEN . KATAMSO (METRO)	1,191
31	31 29	GUNUNG SUGIH - PADANG RATU	30,500
32	32 30	PADANG RATU . PEKURUN UDIK	24,796
33	33 31	PEKURUN UDIK KAGUNGAN	12,560
34	34 32	PADANG RATU - KALIREJO	22,603
35	35 33	KALIREJO - PRINGSEWU	16,392
36	36 34	PRINGSEWU - PARDASUKA	18,797
37	37 35	PARDASUKA - SUKAMARA	5,058
38	38 36	SUKAMARA - KURIPAN	21,777
39	39 37	BRANTI - GEDONG TATAAN	24,124
40	40 38	GEDONG TATAAN - KEDONDONG	16,666
41	41 39	KEDONDONG - PARDASUKA	11,092
42	42 40	PADANG CERMIN - KEDONDONG	29,671
43	43 41 11 K	JALAN TENGRI (BANDAR LAMPUNG)	0,191
44	44 41 12 K	JALAN RE . MARTADINATA (BANDAR LAMPUNG)	5,873
45	45 42	LEMPASING PADANG CERMIN	29,157
46	46 43	PADANG CERMIN - SP TELUK KILUAN	31,732
47	47 44	SP TELUK KILUAN - SP UMBAR	25,157
48	48 45	SP . UMBAR - PUTH DOH	23,830
49	49 46	PUTIH DOH - KURIPAN	11,736
50	50 47	KURIPAN - SP . KOTA AGUNG	21,468
SUBTOTAL 1			834,056

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
51	48	PEKON BALAK - SUOH	33,628
52	49	SUCH - SP . BLOK 9	30,447
53	50	SP BLOK 9- SANGGI	20,873
54	51 11 K	JALAN RADEN INTAN (LIWA)	5,179
55	52	LIWA BTS SUMATERA SELATAN	19,109
56	53 11 K	JALAN ADAM MALIK (KRUI)	1,812
57	54	KRUPEKON SERAI	1,810
58	55	KOTAJAWA - KAMPUNG BARU	8,374
59	56	TALANG PADANG - NGARIP	35,862
60	57	NGARIP - ULU SEMONG	21,500
61	58	ULU SEMONG - SP . TRIMULYO	9,660
62	59	SP . TRIMULYO - HUNGIN - SP . TUGU SARI	24,574
63	60	TEKAD BATUTEGE	4,800
64	61	TAMAN SISWA - RAJA ASLI	3,100
65	62	KOTABUMI BANDAR ABUNG	19,725
66	63	BANDAR ABUNG - BANDAR SAKTI	7,957
67	64	BANDAR SAKTI - SP . DAYA MURNI	10,099
68	65	SP . DAYA MURNI GUNUNGBATIN	12,389
69	66	BANDAR ABUNG - SP . TUJOK	10,807
70	67	NEGARA RATU - SP . TUJOK	35,698
71	68	SP . TUJOK - PANARAGAN JAYA	25,813
72	69	PANARAGAN JAYA - SP . PANARAGAN	4,104
73	70	KOTABUMI - KETAPANG	17,578
74	71	KETAPANG - NEGARA RATU	12,336
75	72	NEGARA RATU - GUNUNG BETUAH	21,066
76	73	GUNUNG BETUAH - GUNUNG LABUAN	12,420
77	74	SP EMPAT - KASUI	18,050
78	75	KASUI - AIR RINGKIH (BTS . SUMSEL)	26,295
79	76	SP . EMPAT - BLAMBANGAN UMPU	11,063
80	77	BLAMBANGAN UMPU - SRI REJEKI	20,421
81	78	SRI REJEKI - PAKUAN RATU	18,660
82	79	PAKUAN RATU - BUMIHARJO	25,595
83	80	BUMIHARJO - SP . WAY TUBA	30,614
84	81	NEGARA RATU - SP . SOPONYONO	15,501
85	82	SP SOPONYONO - SERUPA INDAH	10,858
86	83	SERUPA INDAH PAKUAN RATU	16,423
87	84	SERUPA INDAH - TAJAB	11,200
88	85 11 K	JALAN RAYA GUNUNGSAKTI (MENGGALA)	1,865
89	86	BUJUNG TENUK PENUMANGAN	12,432
90	87	PENUMANGAN TEGAL MUKTI	15,839
91	88	TEGAL MUKTI - TAJAB	36,000
92	89	TAJABADJAYA	23,600
93	90	ADJAYA - TULUNG RANDU	38,130
94	91	PENUMANGAN- UNIT VI	23,562
95	92	SP . UNIT VIII - GEDONG AJI	22,050
96	93	GEDONG AJI-UMBUL MESIR	31,500
97	94	SP . PEMATANG - BRABASAN	11,602
98	95	BRABASAN - WIRALAGA	29,443
SUBTOTAL 2			861,423
TOTAL PROVINSI LAMPUNG			1,695,479



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

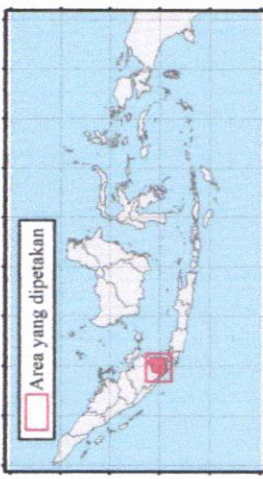
Rancangan Rencana Umum Pengembangan
Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA ADMINISTRASI

SKALA 1:1.000.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Gnd Geografi dan Gnd UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

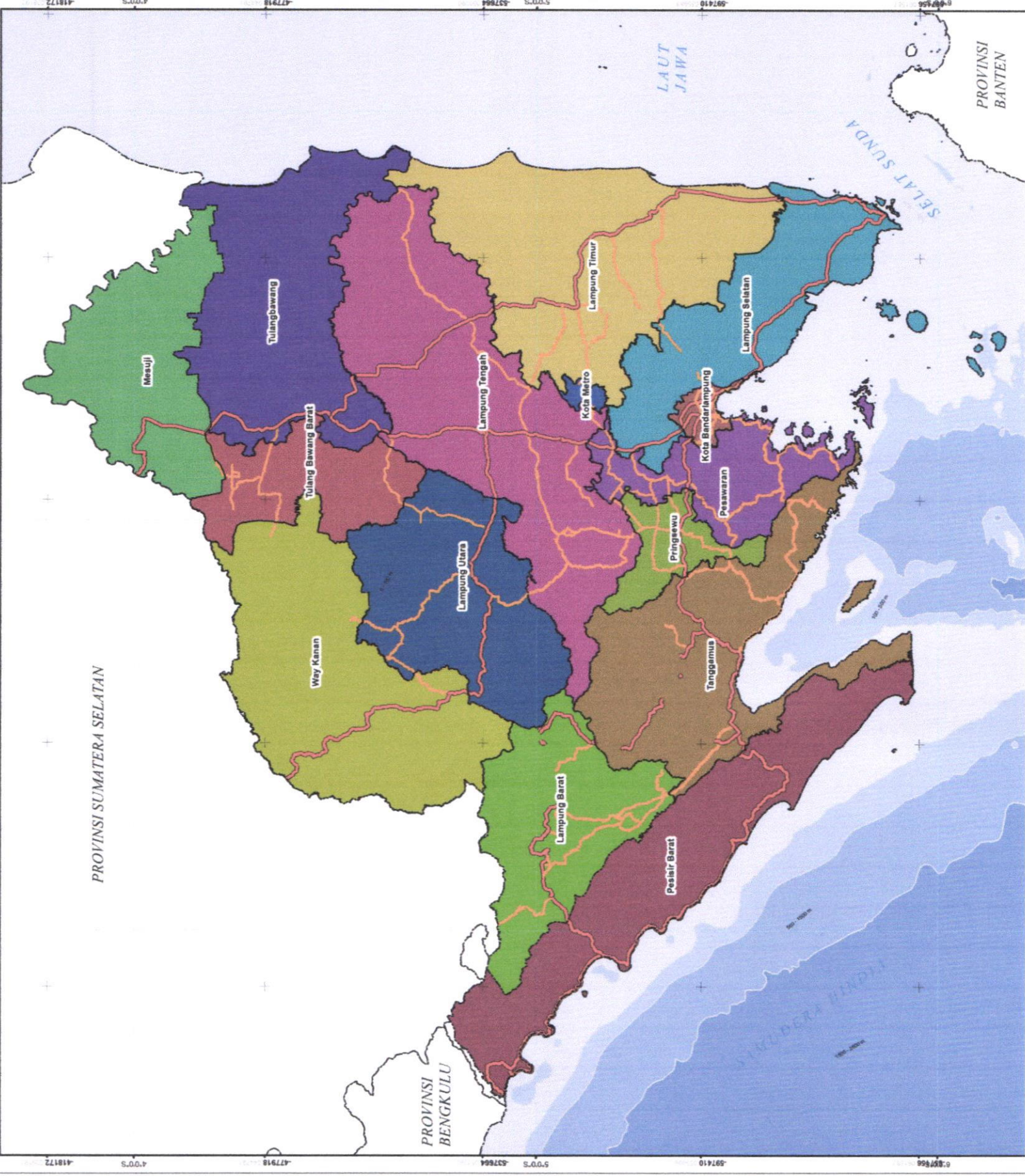


0 4.759 5 19 28.5 38 47.5 57 66.5
Kilometers

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :
Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan
Jaringan Jalan
--- Jalan Arteri
--- Jalan Kolektor
--- Jalan Tol
Nama Kabupaten
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
Lampung Barat
Lampung Selatan
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Utara
Mesuji
Pesawaran
Pesisir Barat
Pringsawu
Tanggamus
Tulung Bawang Barat
Tulungbawang
Way Kanan

Sumber Peta dan Riwayat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal
- Pengolahan data tahun 2023
catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan
Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN

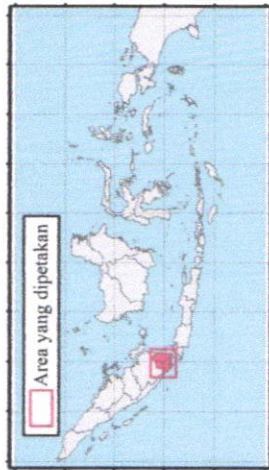
SKALA 1:1.000.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grd UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



A horizontal scale bar with alternating black and white segments. Below the bar, the following values are marked: 0, 4, 7, 5, 9, 5, 19, 28, 5, 38, 47, 5, 57, 66, 5. To the right of the bar, the word "Kilometers" is written vertically.

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Batas Administrasi

--- Batas Provinsi
 .. Batas Kabupaten
 ... Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan

Jaringan Jalan

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Tol

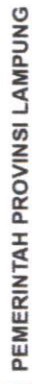
Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019

- Badan Nasional InaGeoportal

- Pengolahan data tahun 2023

catatan:



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan
Jaringan Jalan Provinsi Lampung

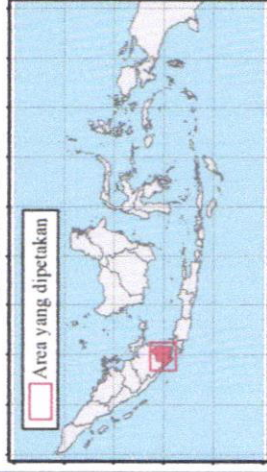
PETA JARINGAN JALAN PROVINSI

SKALA 1:1.000.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Batas Administrasi

Kedalaman Batimetri Laut

0 - 100 m
100 - 500 m
500 - 1500 m
1500 - 2500 m

Simbol

 Ibukota/Kabupaten

Garbana Tol

101. **Answer: A**

• Trik Awal dan Akhir

Jalan

Jalan Nasional

Journal Name

Jalan Pro

Jalan Tol

Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- KIRV Provinsi Lampung tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal

- Pengolahan data tahun 2023

catalan:



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

SKALA 1:79.000



0 0.375 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Batas Administrasi

 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten

Jaringan Jalan
 Jalan Nasional
 Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan
 PKN
 PKW
 PKL

Rencana Terminal
 Tipe A
 Tipe B
 Barang

Rencana Bandar Udara
 Bandar Udara Khusus
 Bandar Udara Pengumpulan
 Bandar Udara Pengumpul

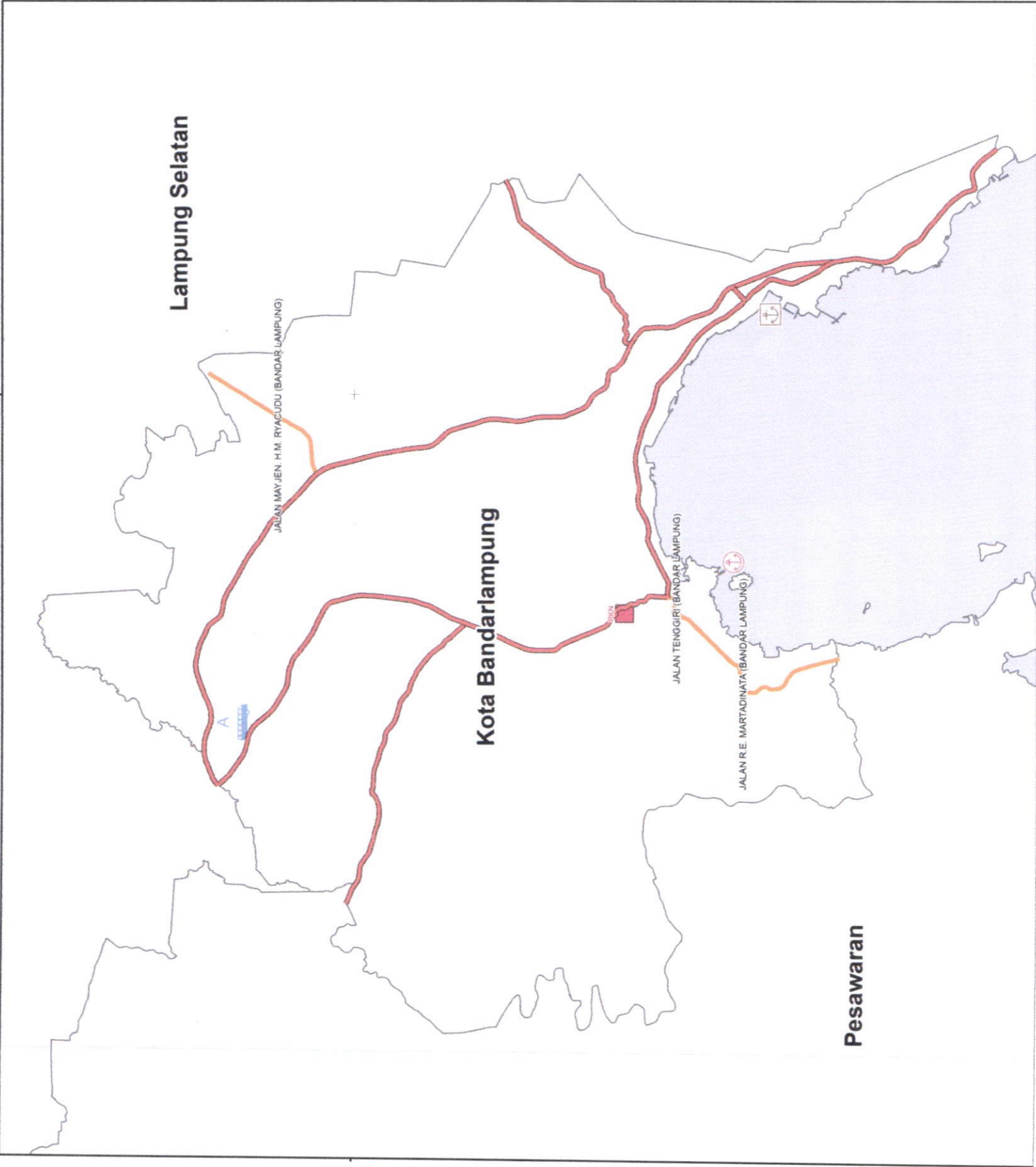
Rencana Pelabuhan
 Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
 Pelabuhan Internasional
 Pelabuhan Pengumpulan Lokal
 Pelabuhan Pengumpulan Regional
 Pelabuhan Pengumpul

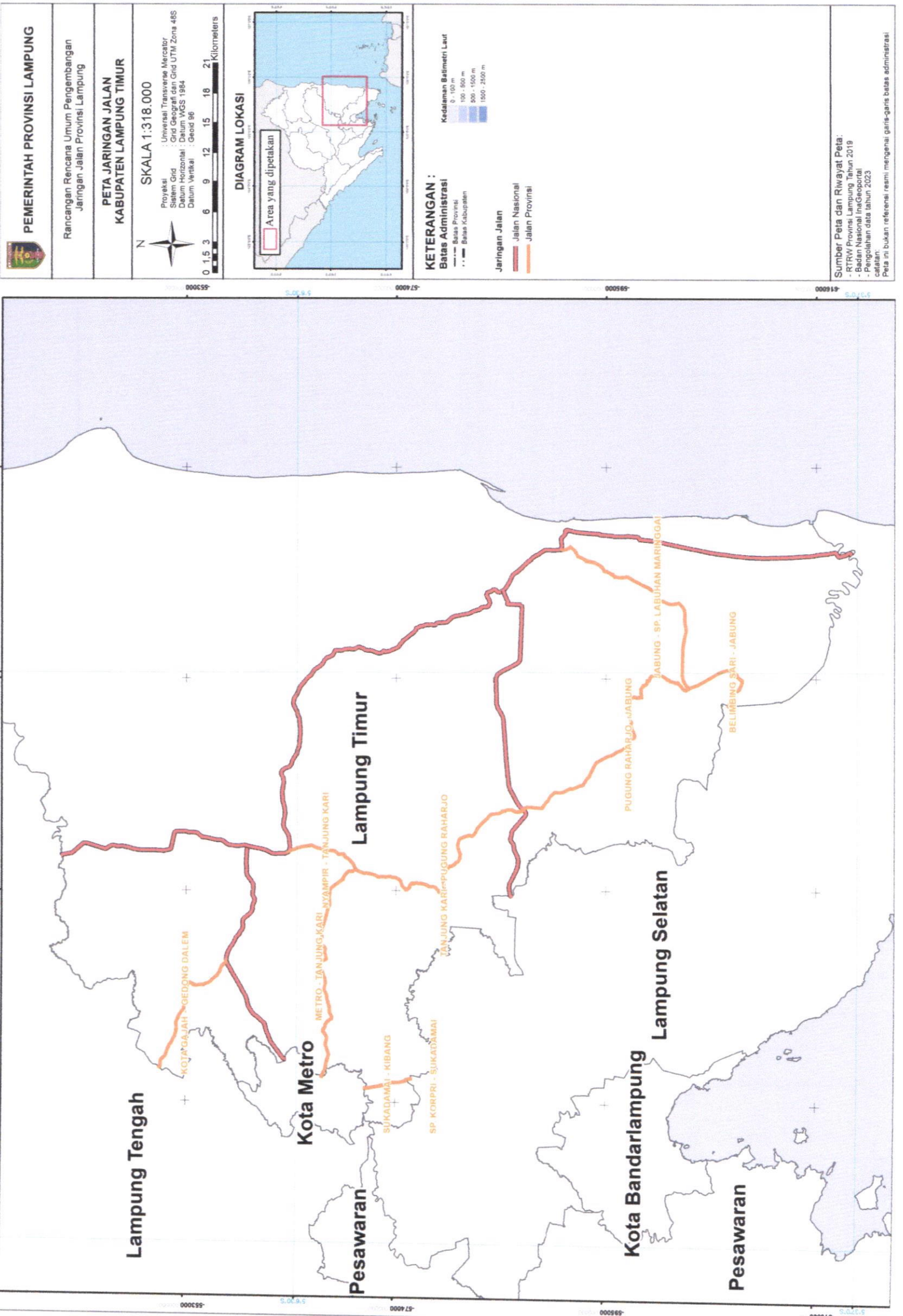
Sumber Peta dan Riwayat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal
- Pengolahan data tahun 2023
catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Lampung Selatan

Kota Bandarlampung

Pesawaran







PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

**PETA JARINGAN JALAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SKALA 1:318.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 1.5 3 6 9 12 15 18 21 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



Area yang dipetakan

KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Kedalaman Batimetri Laut

- 0 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1500 m
- 1500 - 2500 m

Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal
- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KOTA METRO

SKALA 1:51.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid 96

0 0.250.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Kilometers

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Provinsi

--- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

— Jalan Nasional

— Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

PKN

PKW

PKL

Rencana Terminal

A Tipe A

B Tipe B

Barang

Rencana Bandar Udara

Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Pengumpan

Bandar Udara Pengumpul

Rencana Pelabuhan

Pelabuhan Angkutan Penyebrangan

Pelabuhan Internasional

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwat Peta:

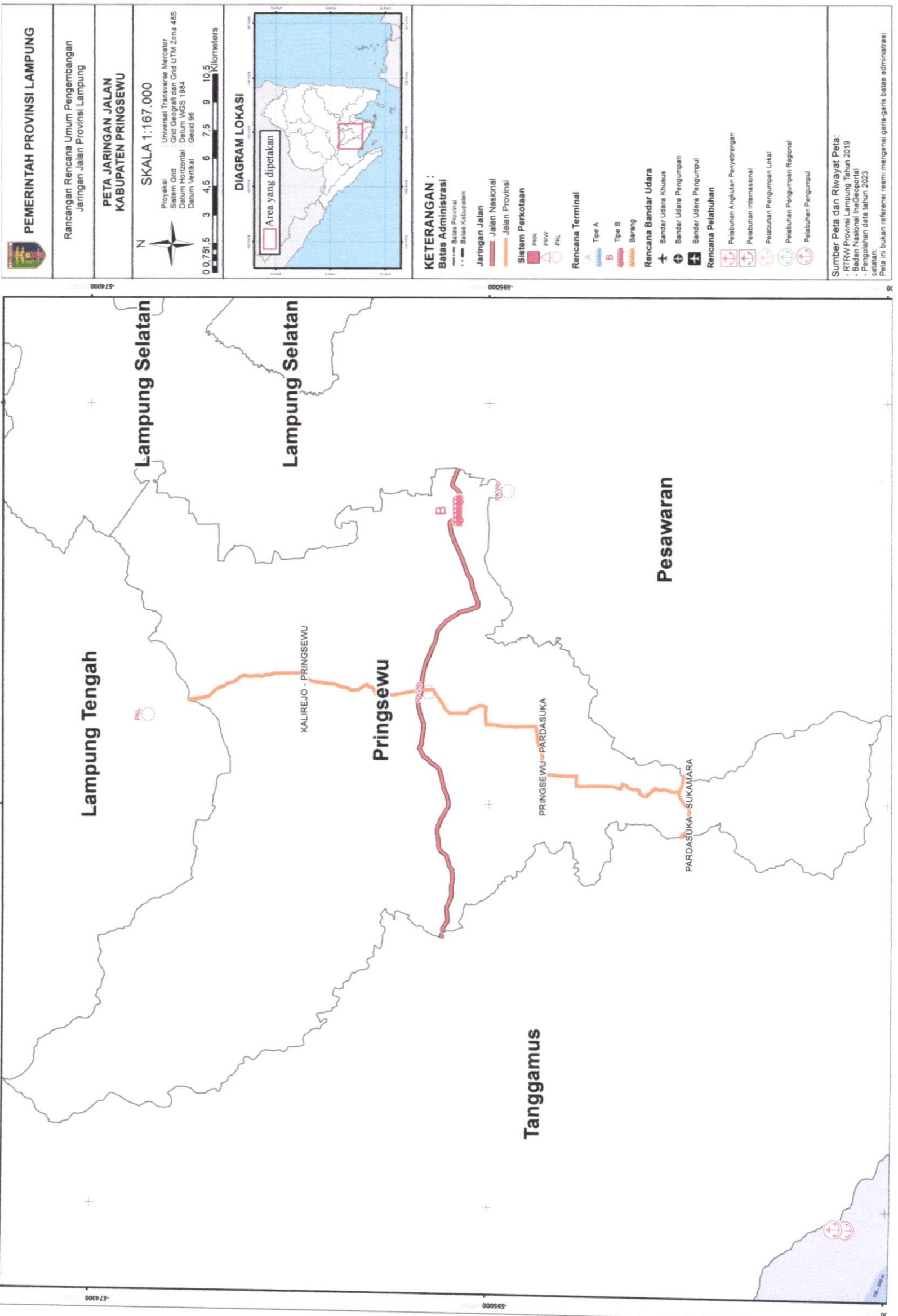
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019

- Badan Nasional InaGeoportal

- Pengolahan data tahun 2023

catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN PRINGSEWU

SKALA 1:167.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

0 0.75 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 Kilometers



KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

- PKN
- PKW
- PKL

Rencana Terminal

- A Tipe A
- B Tipe B
- Barang

Rencana Bandar Udara

- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpang
- Bandar Udara Pengumpul

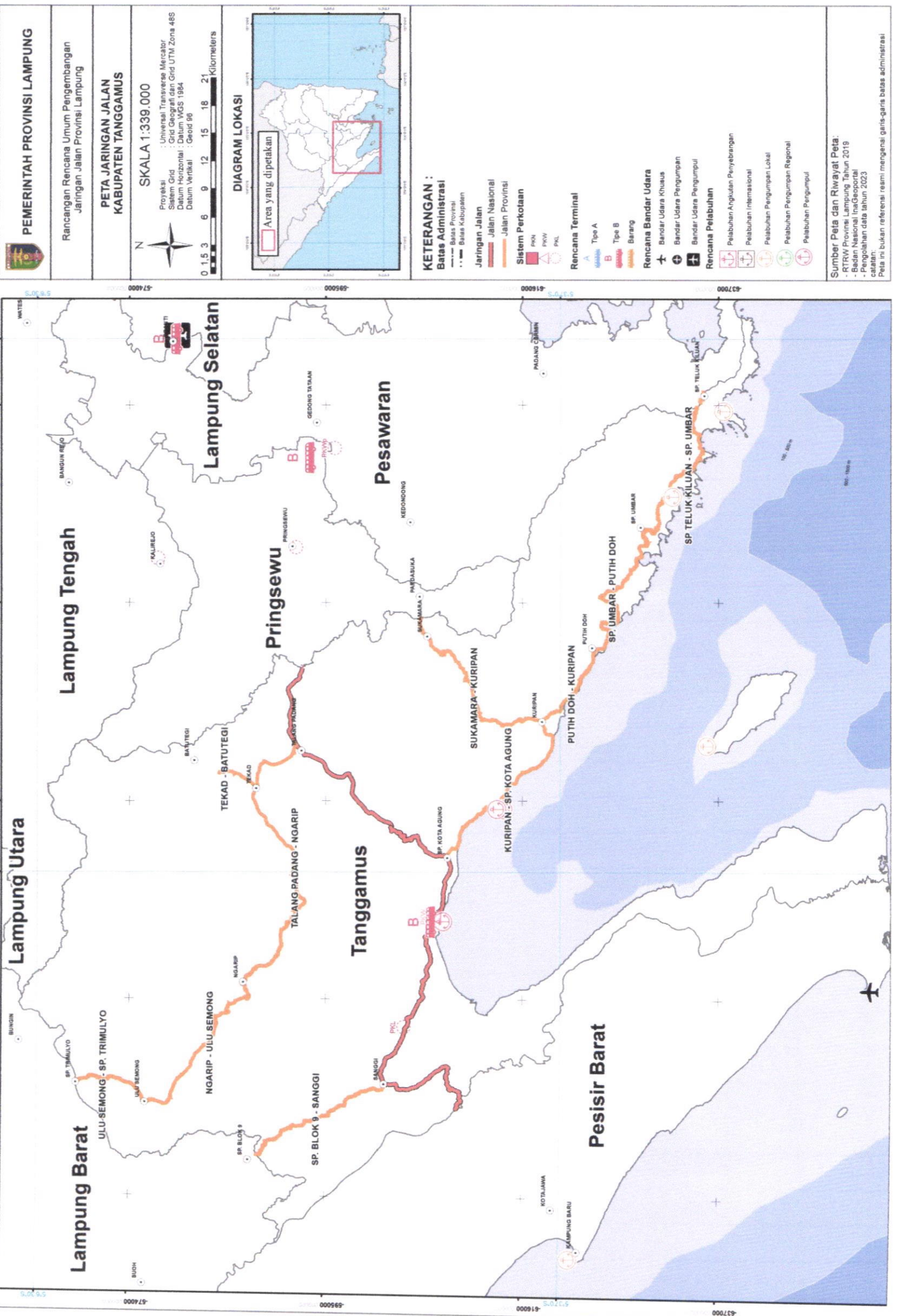
Rencana Pelabuhan

- Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
- Pelabuhan Internasional
- Pelabuhan Pengumpang Lokal
- Pelabuhan Pengumpang Regional
- Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal
- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

**PETA JARINGAN JALAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

SKALA 1:339.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 1.5 3 6 9 12 15 18 21
Kilometers



KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

- PKN
- PKW
- PKL

Rencana Terminal

- A Tipe A
- B Tipe B
- Barang

Rencana Bandar Udara

- ✈ Bandar Udara Khusus
- ✈ Bandar Udara Pengumpan
- ✈ Bandar Udara Pengumpul

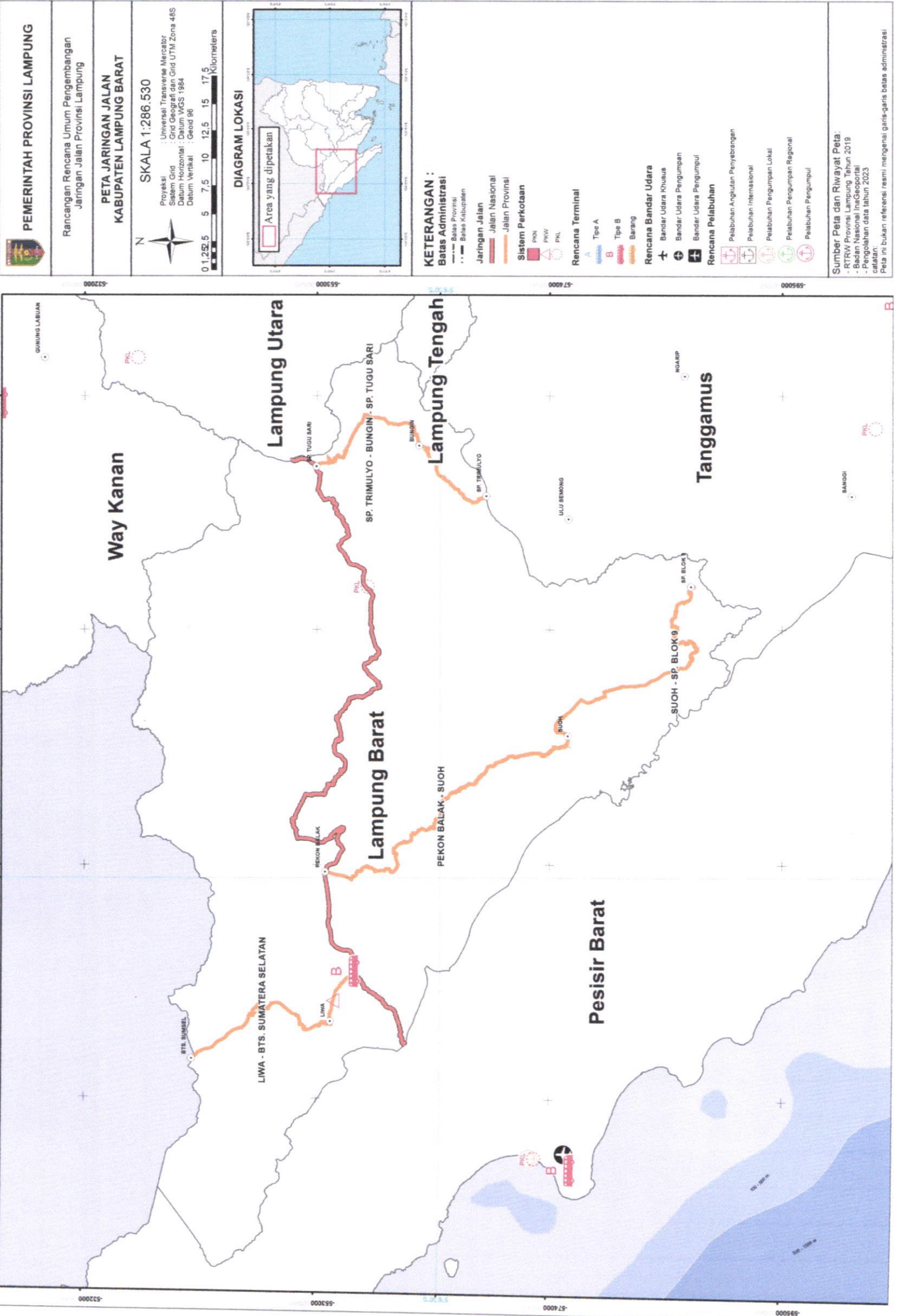
Rencana Pelabuhan

- ⚓ Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
- ⚓ Pelabuhan Internasional
- ⚓ Pelabuhan Pengumpan Lokal
- ⚓ Pelabuhan Pengumpan Regional
- ⚓ Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- BTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional Geospasial
- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SKALA 1:286.530

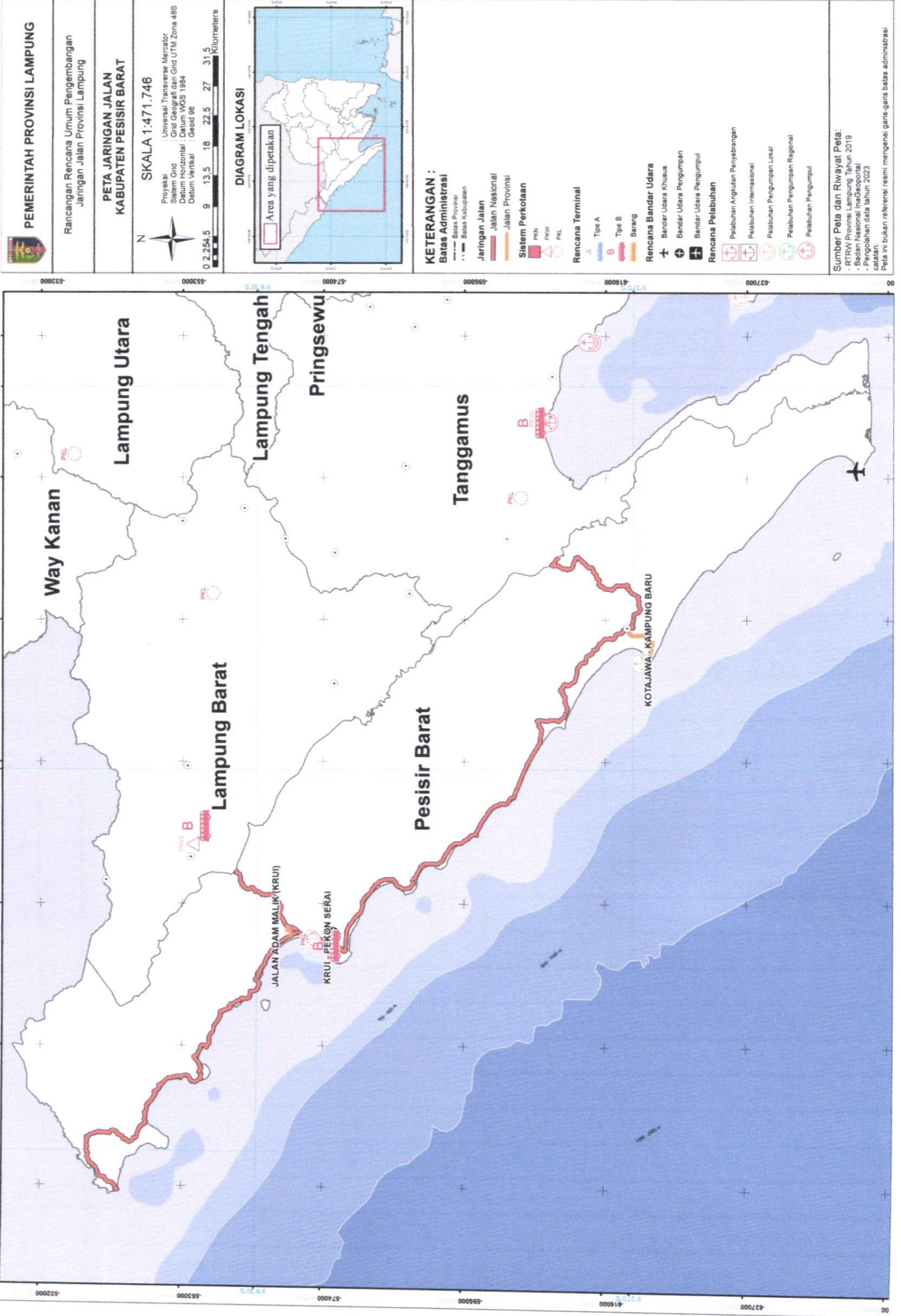
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

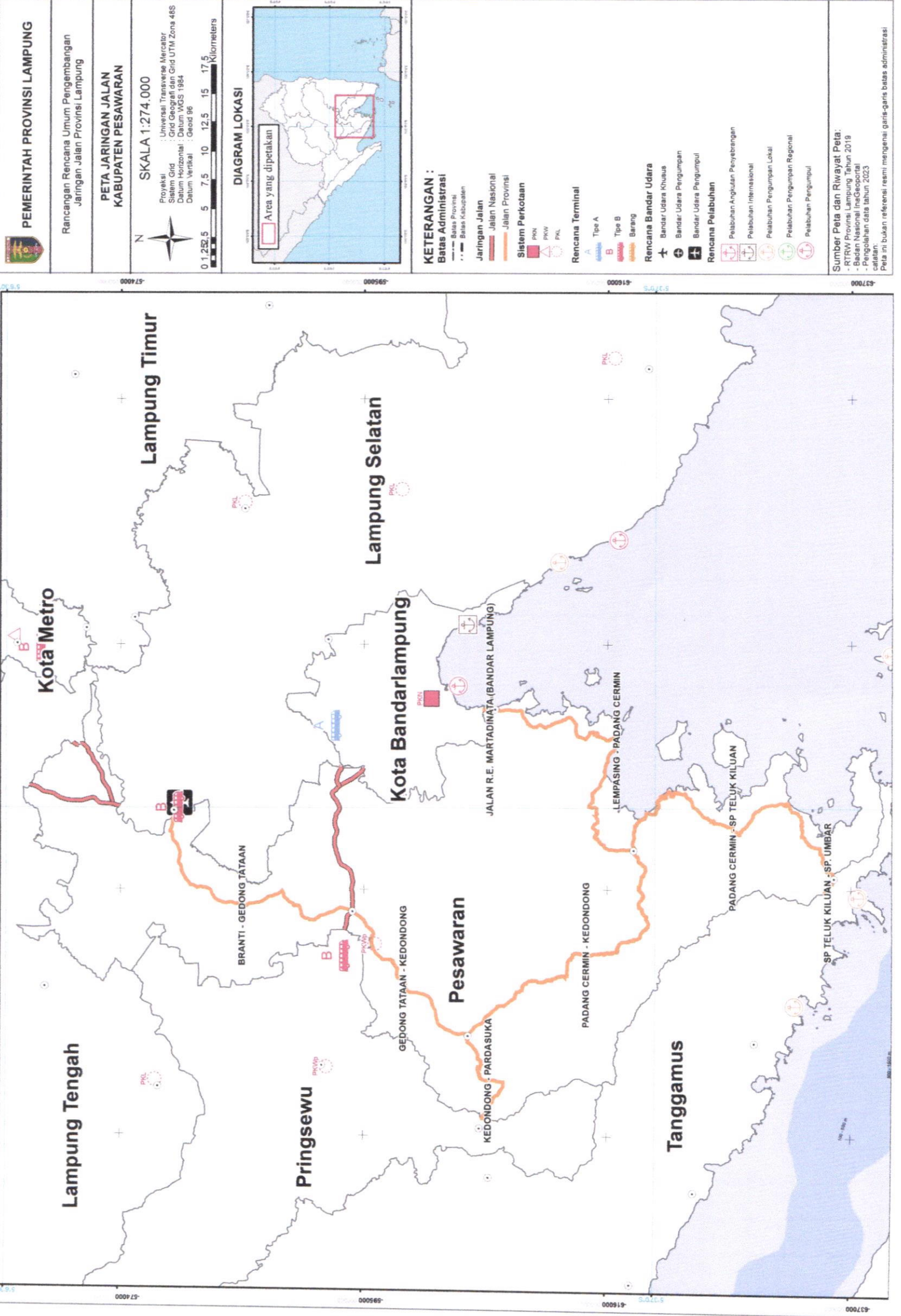
0 1.25 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 Kilometers



- KETERANGAN :**
- Batas Administrasi
 - Provinsi
 - Kabupaten
 - Kecamatan
 - Jaringan Jalan
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Sistem Perkotaan
 - PKN
 - PKW
 - PKL
 - Rencana Terminal
 - A
 - B
 - Barang
 - Rencana Bandar Udara
 - Bandar Udara Khusus
 - Bandar Udara Pengumpan
 - Bandar Udara Pengumpul
 - Rencana Pelabuhan
 - Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
 - Pelabuhan Internasional
 - Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional InaGeoportal
- Pengolahan data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi







PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

**PETA JARINGAN JALAN
KABUPATEN PESAWARAN**

SKALA 1:274.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 1.25 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 Kilometers



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan
--- Jalan Nasional
--- Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan
PKN
PKW
PKL

Rencana Terminal
A Tipe A
B Tipe B
Barang

Rencana Bandar Udara
Bandar Udara Khusus
Bandar Udara Pengumpan
Bandar Udara Pengumpul

Rencana Pelabuhan
Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
Pelabuhan Internasional
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:
RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
Badan Nasional Geospasial
Pengolahan data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SKALA 1:496.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 2,5 5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan
--- Jalan Nasional
--- Jalan Provinsi
--- Sistem Perkotaan
PKN
PKW
PKL

Rencana Terminal
A Tipe A
B Tipe B
Barang

Rencana Bandar Udara
Bandar Udara Khusus
Bandar Udara Pengumpan
Bandar Udara Pengumpul
Rencana Pelabuhan

Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
Pelabuhan Internasional
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:
- RTW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional Geospasial
- Pengolahan data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

The main map displays the road network of Lampung Tengah, with districts including Tulangbawang, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, and Pesawaran. The map shows various road types (National, Provincial, Urban) and planned terminals (Type A, Type B, Cargo). It also indicates planned airports and ports. Landmarks like Gunung Batin and Gunung Sugih are marked. The map includes a coordinate grid and a scale bar.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SKALA 1:312.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid 96

N



0 1,5 3 6 9 12 15 18 21

Kilometers

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Provinsi

--- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

— Jalan Nasional

— Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

PKN

PKW

PKL

Rencana Terminal

A

Type A

B

Type B

Barang

Rencana Bandar Udara

Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Pengumpan

Bandar Udara Pengumpul

Rencana Pelabuhan

Pelabuhan Angkutan Penyebrangan

Pelabuhan Internasional

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan Pengumpul

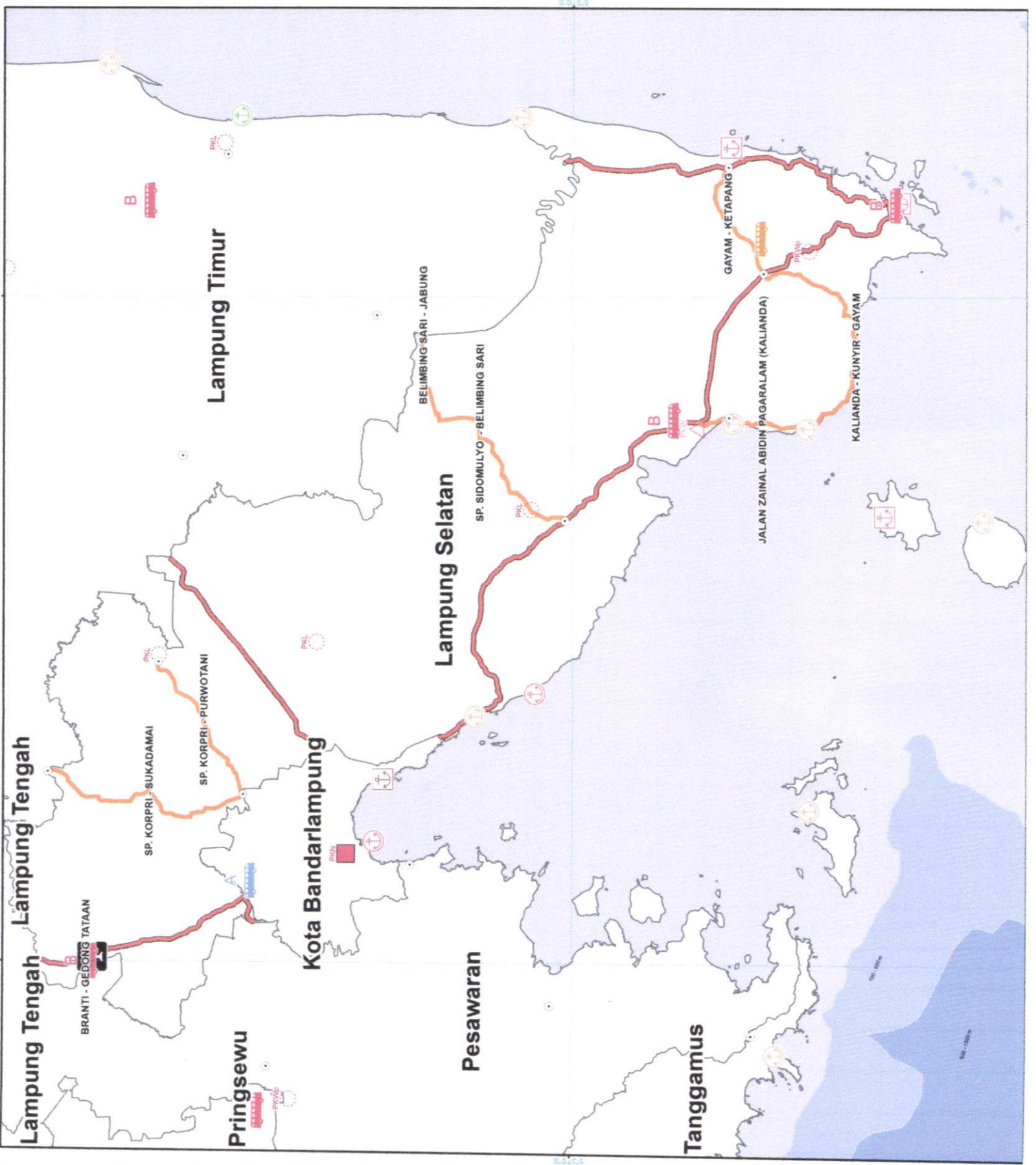
Sumber Peta dan Riwayat Peta:

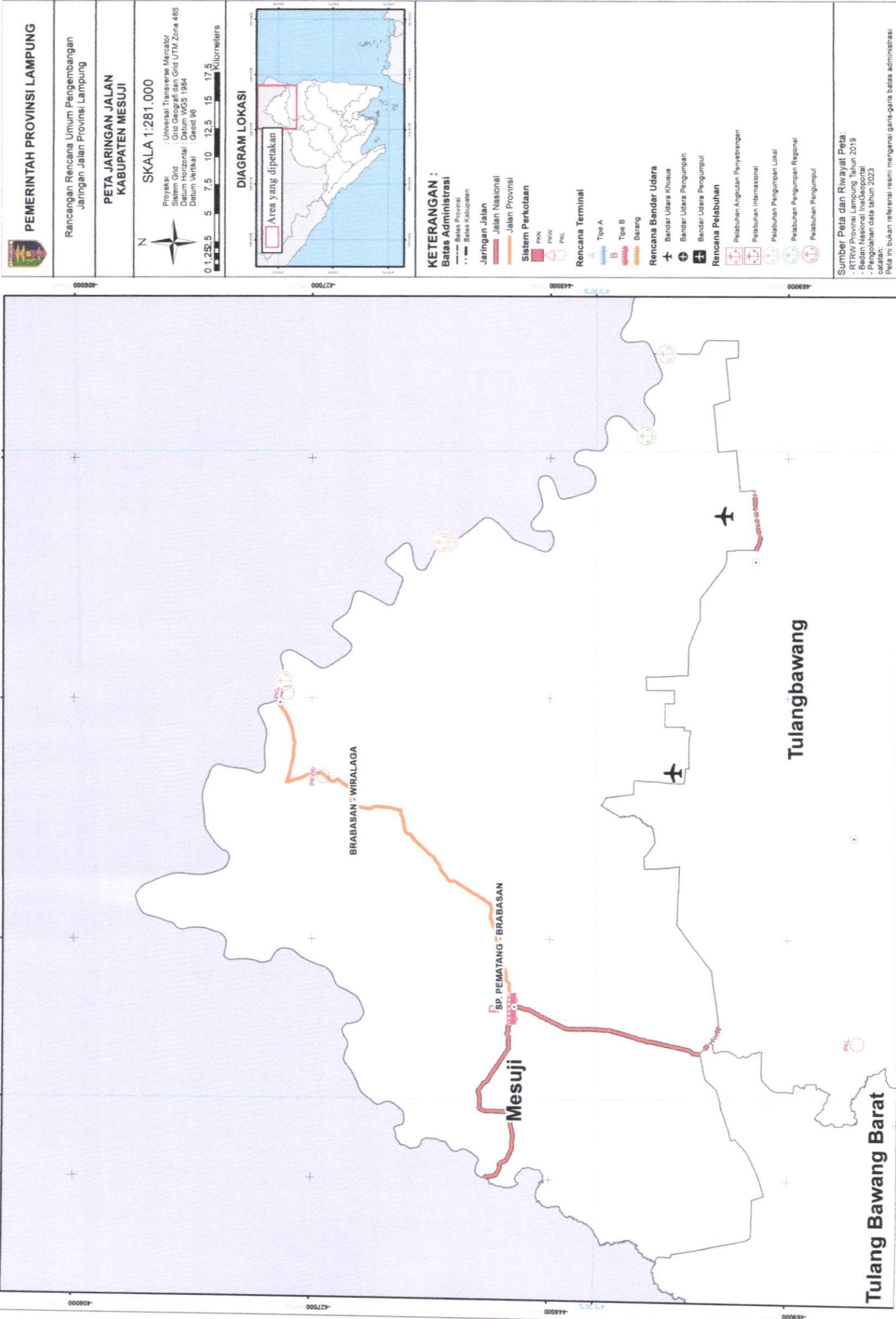
- RTRW Provinsi Lampung tahun 2019

- Badan Nasional InaGeoport

- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN MESUJI

SKALA 1:281.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

0 1,25 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

Jalan Nasional

Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

PKN

PKW

PKL

Rencana Terminal

A Tipe A

B Tipe B

Barang

Rencana Bandar Udara

Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Pengungpan

Bandar Udara Pengumpul

Rencana Pelabuhan

Pelabuhan Angkutan Penyebrangan

Pelabuhan Internasional

Pelabuhan Pengungpan Lokal

Pelabuhan Pengungpan Regional

Pelabuhan Pengumpul

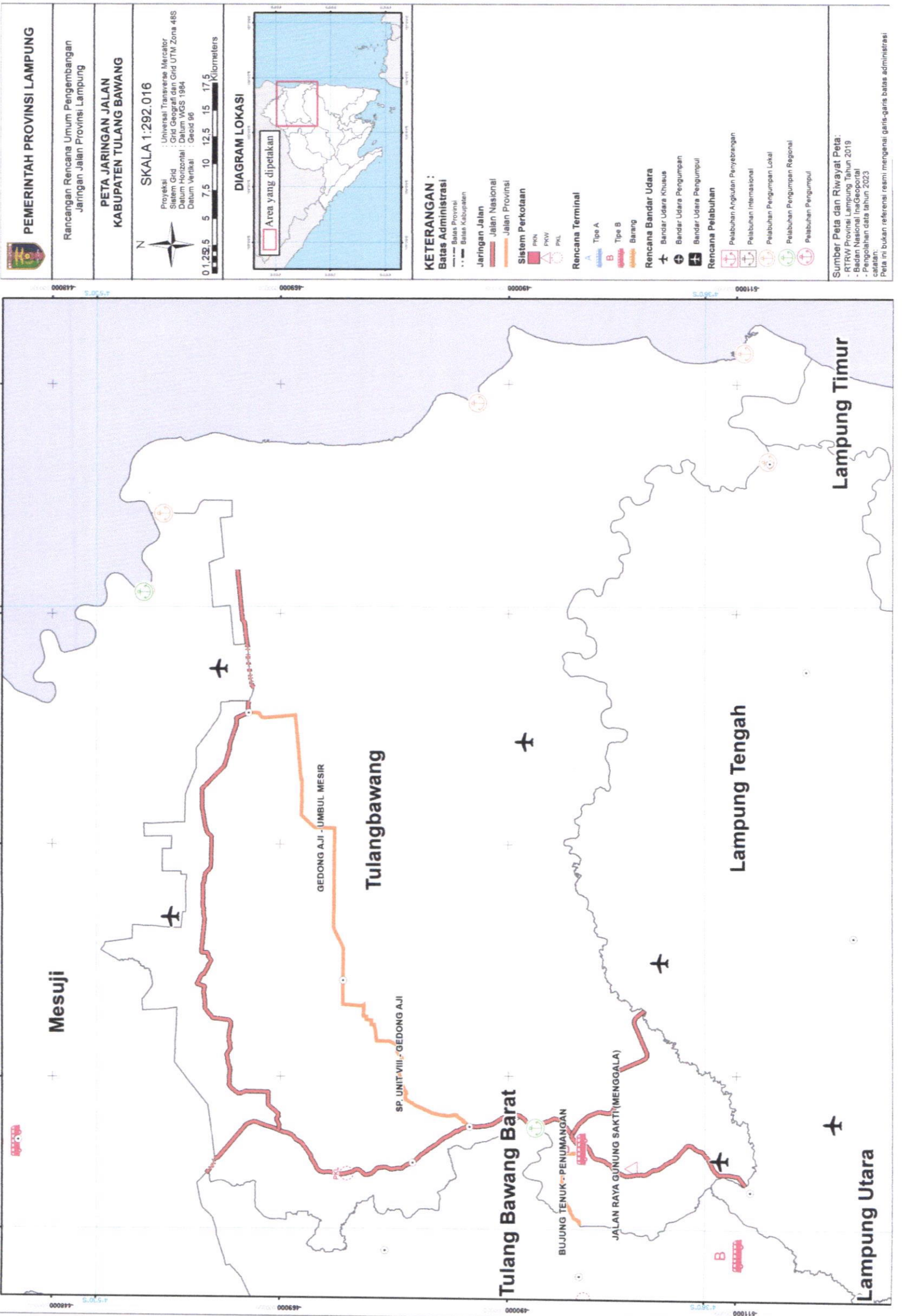
Sumber Peta dan Rwayat Peta:

- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019

- Badan Nasional InaGeoportal

- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

**PETA JARINGAN JALAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

SKALA 1:292.016

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 1.25 5 7.5 10 12.5 15 17.5
Kilometers



KETERANGAN :

 Batas Administrasi

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten

 Jaringan Jalan

 Jalan Nasional

 Jalan Provinsi

 Sistem Perkotaan

 PKN

 PKW

 PKL

 Rencana Terminal

 Tipe A

 Tipe B

 Barang

 Rencana Bandar Udara

 Bandar Udara Khusus

 Bandar Udara Pengumpulan

 Bandar Udara Pengumpul

 Rencana Pelabuhan

 Pelabuhan Angkutan Penyebrangan

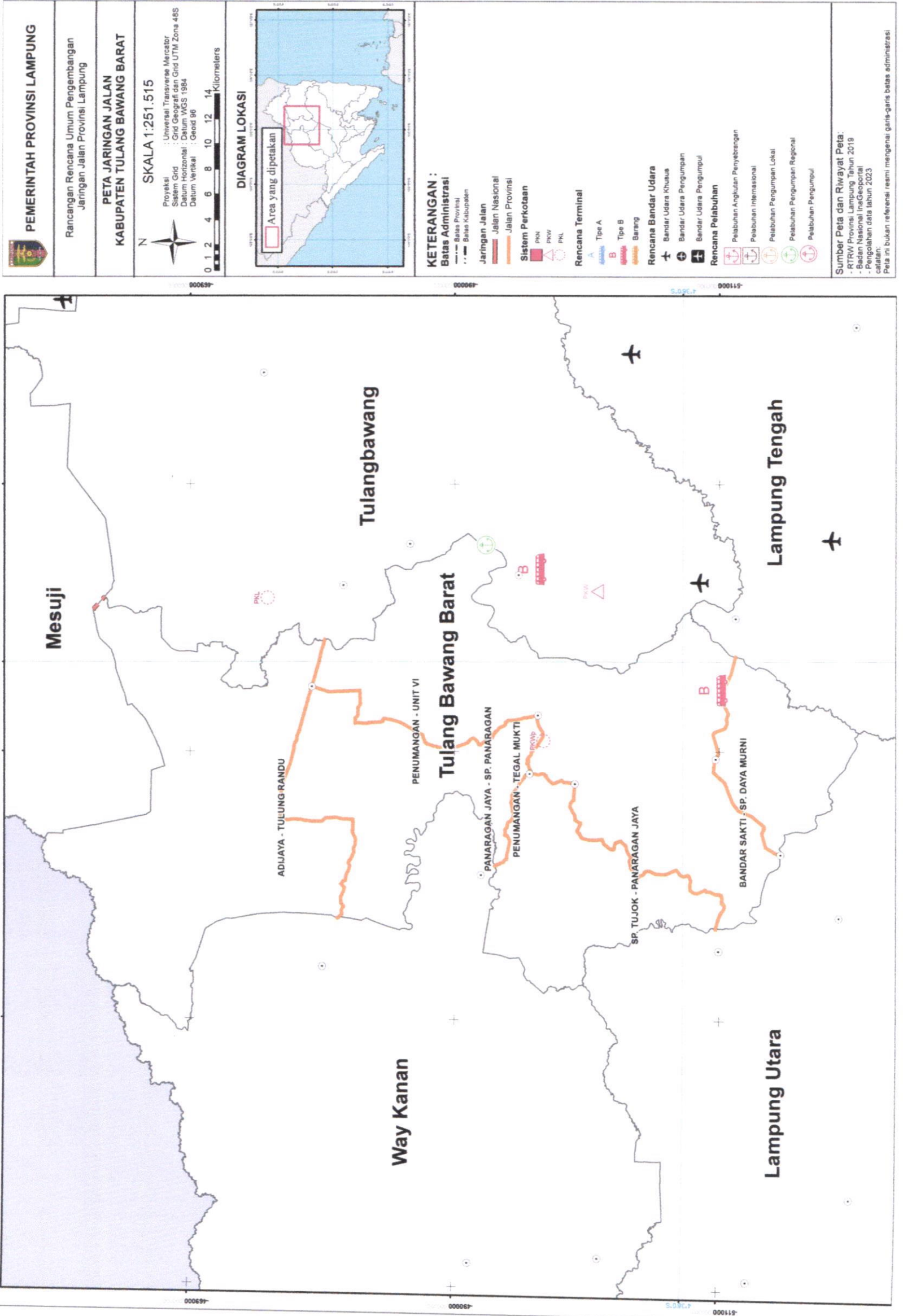
 Pelabuhan Internasional

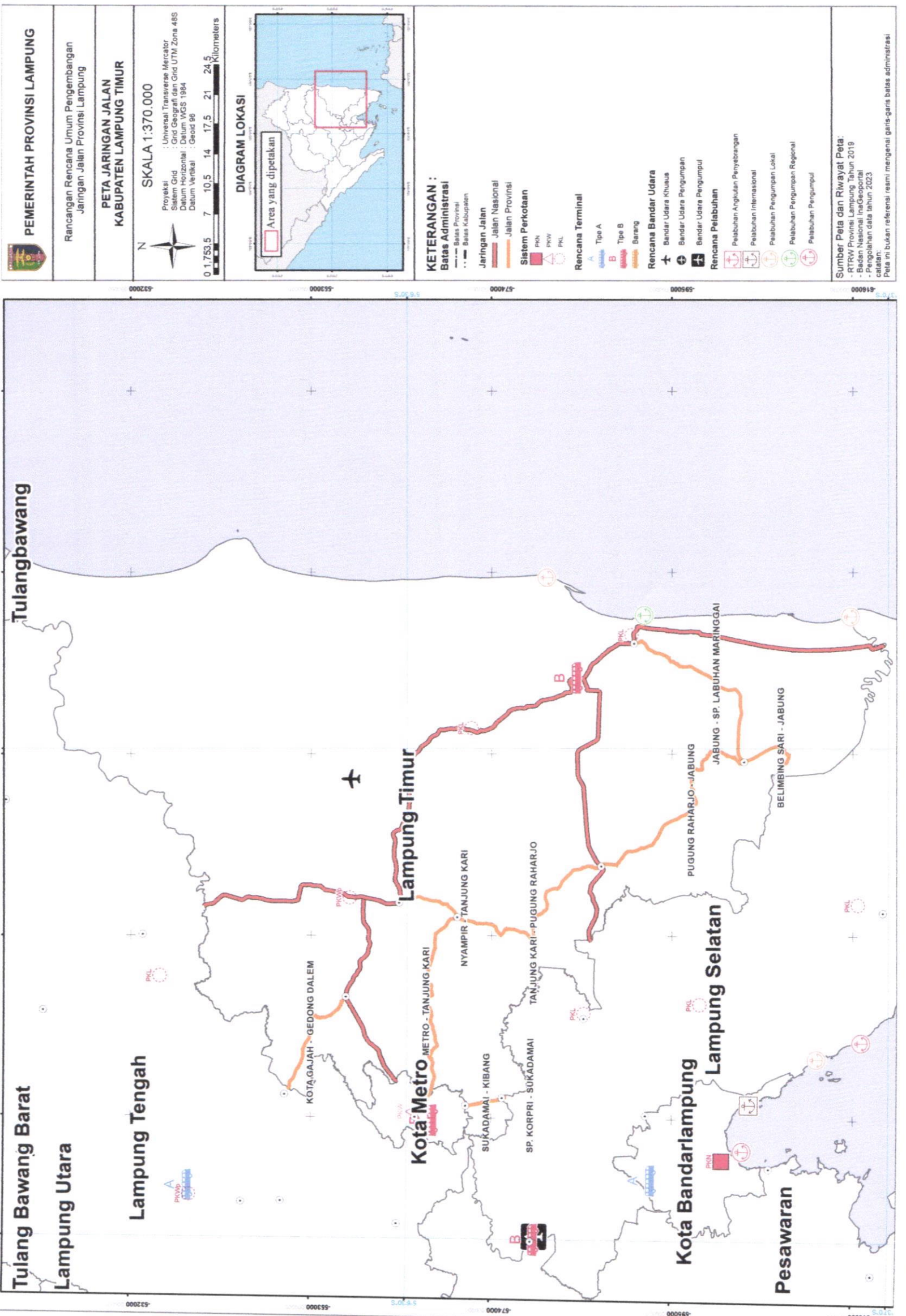
 Pelabuhan Pengumpulan Lokal

 Pelabuhan Pengumpulan Regional

 Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional Geospasial
- Pengolahan data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi







PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SKALA 1:370.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

0 1.753.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



Area yang dipetakan

KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Jaringan Jalan

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi

Sistem Perkotaan

- PKN
- PKW
- PKL

Rencana Terminal

- A Tipe A
- B Tipe B
- Barang

Rencana Bandar Udara

- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpulan
- Bandar Udara Pengumpul

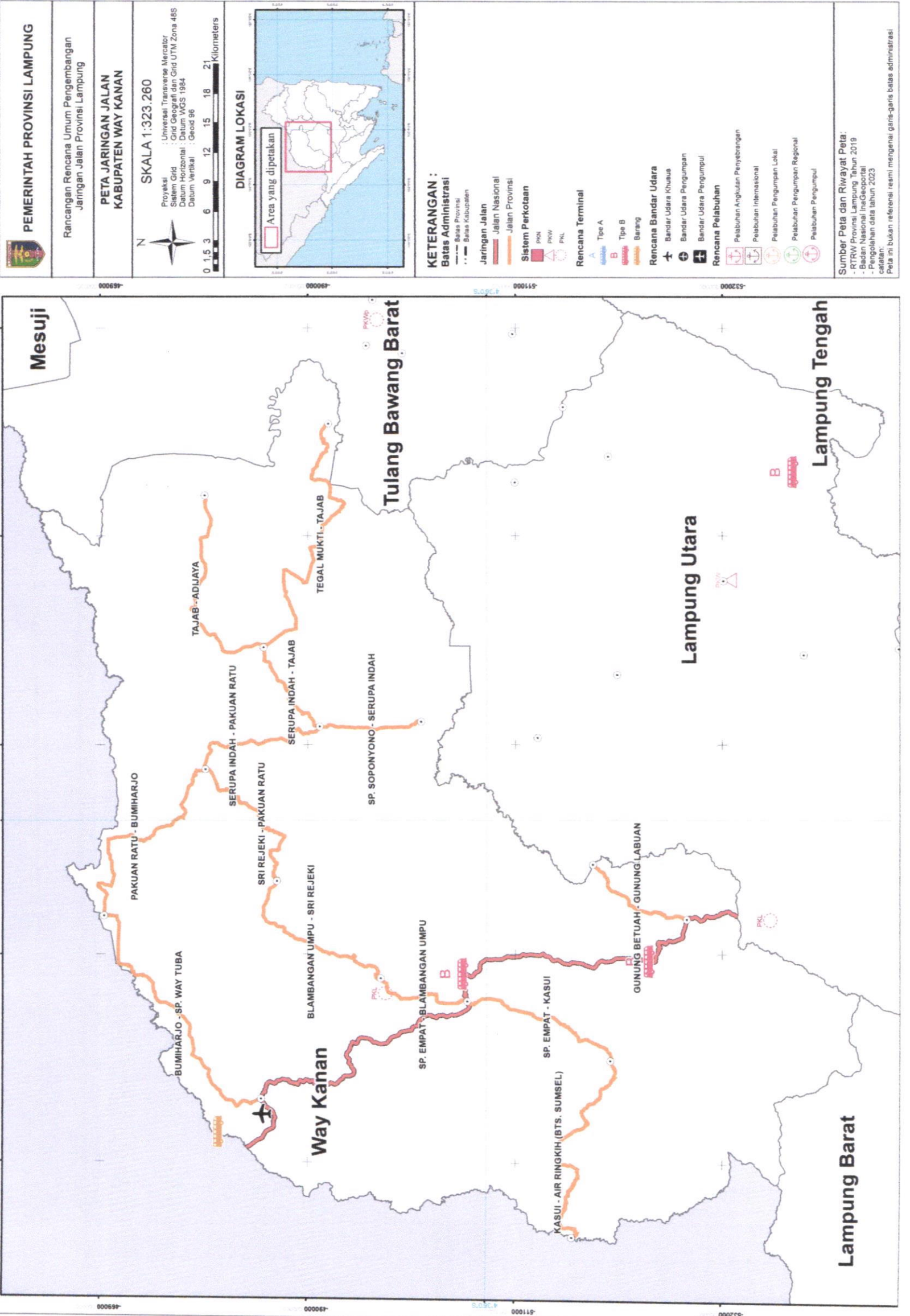
Rencana Pelabuhan

- Pelabuhan Angkutan Penyebrangan
- Pelabuhan Internasional
- Pelabuhan Pengumpulan Lokal
- Pelabuhan Pengumpulan Regional
- Pelabuhan Pengumpul

Sumber Peta dan Riwayat Peta:

- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional Geospasial
- Pengolahan data tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi







PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA URUTAN PRIORITAS PENANGKALAN JARINGAN JALAN

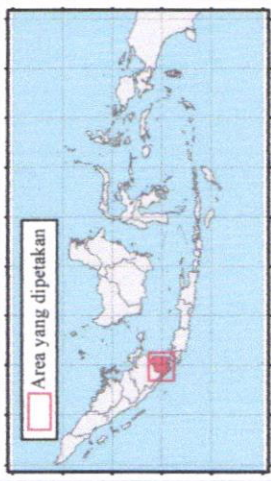
SKALA 1:1.000.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96



0 4.759.5 19 28.5 38 47.5 57 66.5 Kilometers

DIAGRAM LOKASI



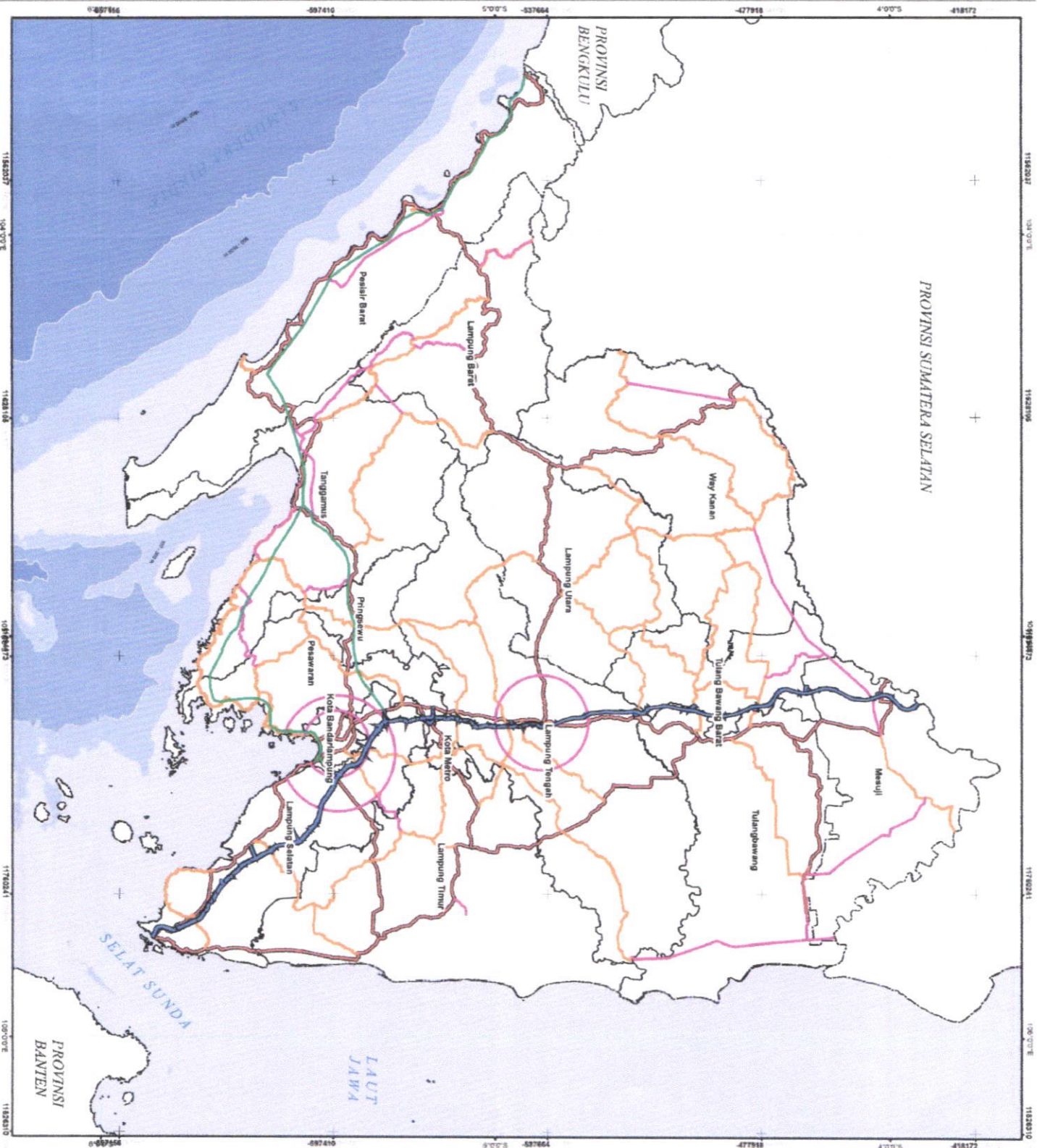
KETERANGAN :
Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten

Jalan Nasional

Jalan TOL

Urutas Prioritas Penangkalan
Periode I
Periode II
Periode III
Periode IV

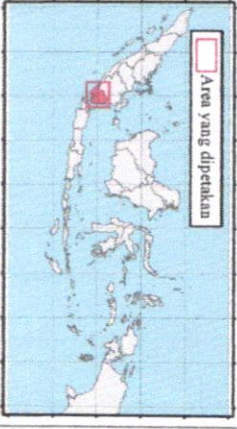
Sumber Peta dan Riwayat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2019
- Badan Nasional Geografi
- Pengolahan data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Rancangan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Lampung

PETA REKOMENDASI RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1 : 1.000.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid : Geoid 1984
Datum Vertikal : Garis Rata-rata
0 4.750 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kilometer



- KETERANGAN :**
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan TOL
Rencana Jalan TOL
Rencana Jalan Baru Non Tol dan Rencana Peningkatan Status Jalan

Sumber Peta dan Riwaiyat Peta:
- RTRW Provinsi Lampung Tahun 2018
- Badan Nasional Geospasial
- Pengukuran data tahun 2023
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

GOVERNOR LAMPUNG,
[Signature]
ARNAL DJUNAJDI